



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP TAHUN 2024



Jl. A.Yani No.1 Telp-Fax. (0741) 66269
e-Mail : diskominfo@Jambiprov.go.id
Website [http : // diskominfo.Jambiprov.go.id](http://diskominfo.Jambiprov.go.id)



Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan Penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, 13 Januari 2025

KEPALA DINAS,



Drs. ARIANSYAH, ME

Pembina Utama Madya

NIP. 19720603 199302 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi, dengan indikatornya Peringkat keterbukaan Informasi publik dengan capaian 87,15%;
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral dengan indikatornya Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral terupdate, valid dan terintegrasi dengan capaian 100%;
3. Sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikatornya Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan capaian 101,66%;
4. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan indikatornya Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi dengan capaian 108,79%;
5. Sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 112,49%; dan
6. Sasaran Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja dengan indikator Nilai AKIP dengan capaian 100,21%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kominfo Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan;

2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif; dan
3. Menindaklanjuti rencana perbaikan setiap sasaran dan indikator Tahun 2024.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Kominfo Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GRAFIK	7
DAFTAR GAMBAR	8
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1 Struktur Organisasi.....	10
1.2 Tugas dan Fungsi.....	11
1.3 Isu-isu Strategis	11
1.4 Keadaan Pegawai	12
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	15
1.6 Keuangan	16
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 Perencanaan Strategis	18
2.1.1.Visi dan Misi Kepala Daerah	19
2.1.2Tujuan dan Sasaran Perangkat DaerahTujuan.....	21
2.1.3Strategi dan Arah Kebijakan.....	23
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	25
2.3.1Target Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi	25
2.3.2Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	25
2.4 Instrumen Pendukung.....	26
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	28
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Kinerja Lainnya.	29
3.3. Realisasi Anggaran	49
BAB 4 PENUTUP	58
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Aset-aset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	15
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026.....	20
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	23
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2024... 25	
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.....	26
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	28
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024	28
Tabel 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Kinerja Lainnya .	30
Tabel 3.4. Kualifikasi Penilaian Keterbukaan Informasi	30
Tabel 3.5. Penilaian Kuisisioner Keterbukaan Informasi	31
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2022-2024	32
Tabel 3.7 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	32
Tabel 3.8 Sasaran 2	34
Tabel 3.9 Realisasi Sasaran 2 Tahun 2022-2024	35
Tabel 3.10 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	35
Tabel 3.11 Sasaran 3	37
Tabel 3.12 Tingkat Kematangan Penerapan SPBE	37
Tabel 3.13 Nilai Domain dan Apek SPBE Provinsi Jambi Tahun 2024	38
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022-2024.....	38
Tabel 3.15 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	39
Tabel 3.16 Sasaran 4	41
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Tahun 2022-2024	42
Tabel 3.18 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	42
Tabel 3.19 Sasaran 5	43
Tabel 3.20 Pengukuran IKM.....	44
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Tahun 2022-2024	45
Tabel 3.22 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	46
Tabel 3.23 Sasaran 6	46
Tabel 3.24 Nilai Akuntabilitas Kinerja	47
Tabel 3.25 Realisasi Tahun 2022-2026.....	48
Tabel 3.26 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	48
Tabel 3.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024 ..	49
Tabel 3.28 Analisis efisiensi Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024	56

Daftar Grafik

Grafik 1.1. Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jenis Jabatan Kepegawaian Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024	13
Grafik 1.2. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024	14
Grafik 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024.....	14
Grafik 3.1. Distribusi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024.....	40

Daftar Gambar



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Jambi	10
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu-Isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024 diharapkan dapat :

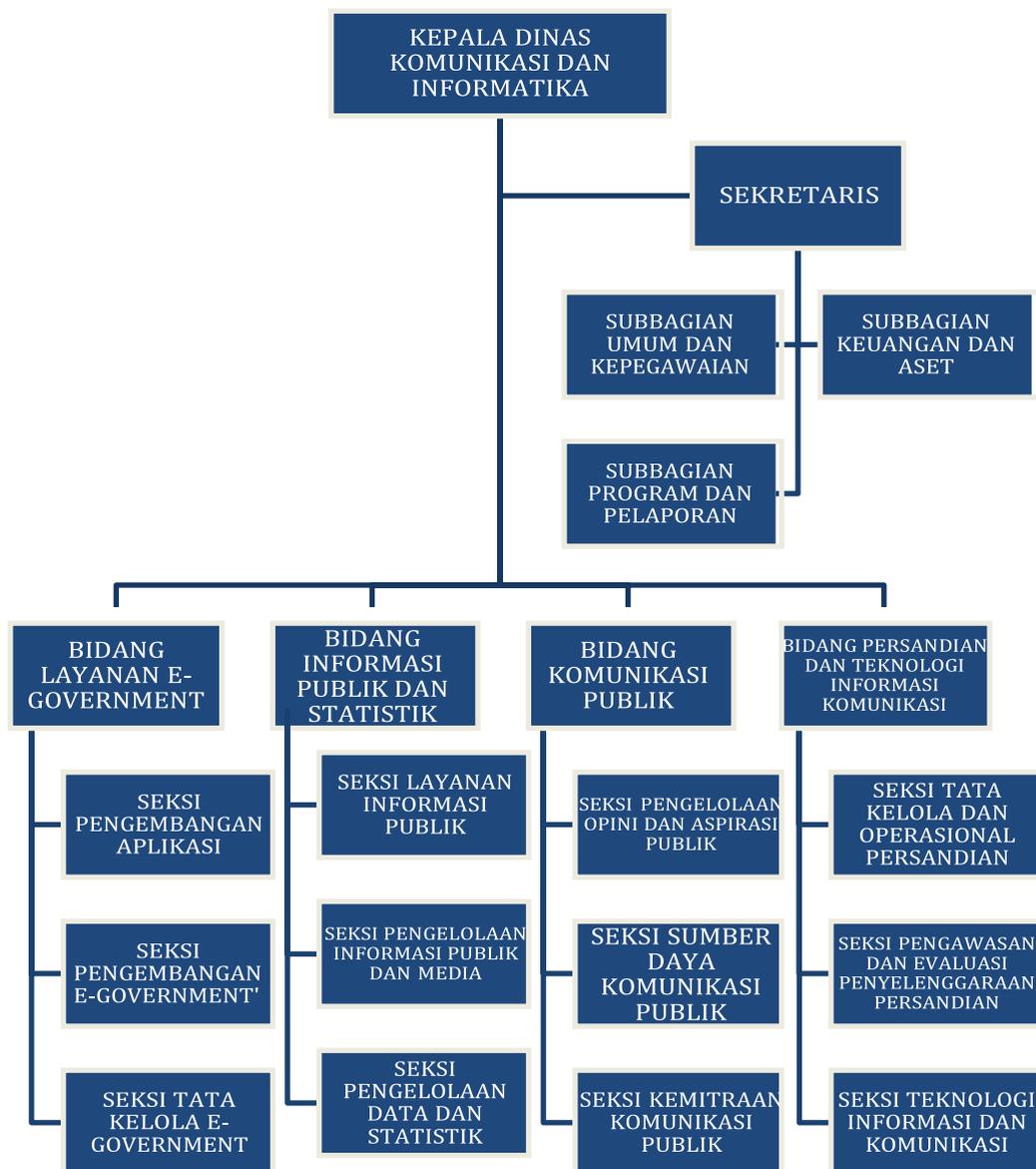
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi
2. Mendorong Dinas Kominfo Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kominfo Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kominfo Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kominfo Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Jambi



1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Dinas Kominfo mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan pembinaan di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Kominfo Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Tugas dan Fungsi tersebut dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Kominfo Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kominfo Provinsi Jambi , antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen Bersama Perangkat daerah terkait keterbukaan Informasi publik pemerintah daerah mengingat sumber Informasi berasal dari Perangkat daerah dan menjamin ketersediaan layanan Informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat.
2. Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat secara mudah;
3. Jumlah kerjasama dengan media melebihi target namun perlu memperhatikan kriteria yang harus dipenuhi oleh media.
4. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Provinsi Jambi pada semua Perangkat Daerah serta jaringan intranet kepada pemerintah kabupaten/kota yang juga merupakan indikator nasional;
5. Peningkatan komitmen dan implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Jambi dengan memperhatikan percepatan penerapan system penghubung layanan pemerintah daerah, optimalisasi layanan pemerintah berbasis elektronik, dan;
6. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Jambi yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan.

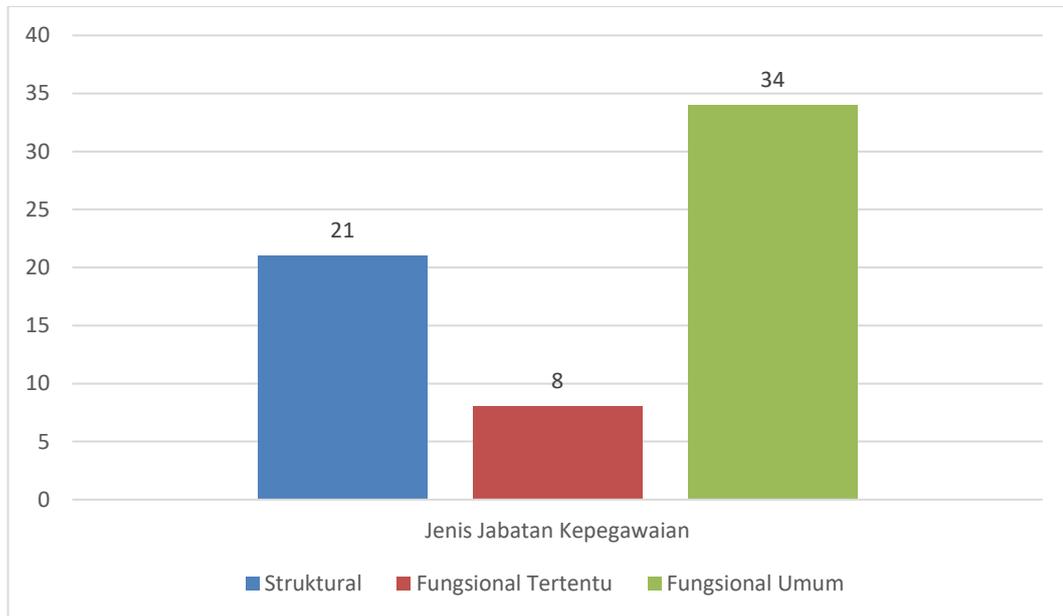
1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kominfo Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kominfo, Statistik dan Persandian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Kominfo Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 63 pegawai yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan pejabat

fungsi umum. Profil Kepegawaian Dinas Kominfo Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

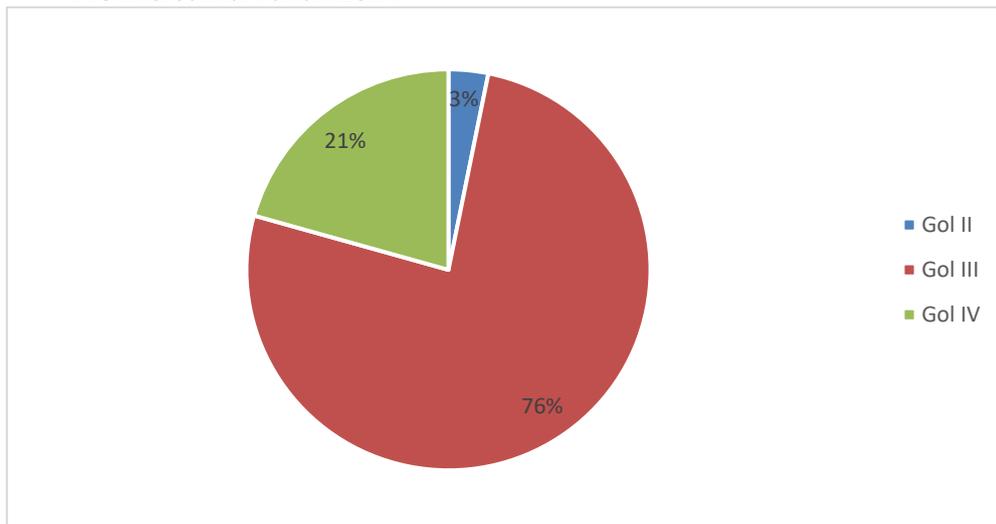
Grafik 1.1. Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jenis Jabatan Kepegawaian Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024



Sumber: Diskominfo Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat tergambar bahwa jabatan kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mayoritas menduduki jabatan fungsional umum. Untuk menciptakan iklim birokrasi yang lebih dinamis dan profesional dibutuhkan kekhususan pekerjaan yang berbeda-beda seperti pada jabatan fungsional tertentu. Jabatan pada rumpun kekomputeran sangat dibutuhkan untuk mendukung sasaran strategis dinas.

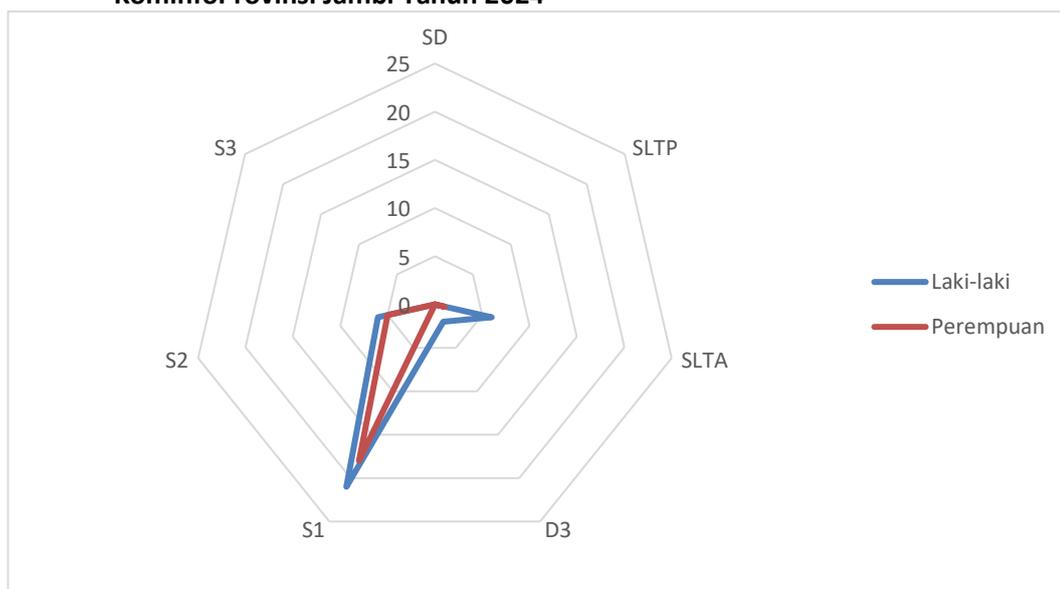
Grafik 1.2. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024



Sumber: Diskominfo Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan jumlah pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Kominfo yang sebagian besar merupakan pegawai Golongan III. Gambaran ini juga menunjukkan bahwa minimnya pegawai yang dapat melakukan uji kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional tertentu dengan kualifikasi professional tingkat tinggi. Jika dilihat dari tingkat Pendidikan profil kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024



Sumber: Diskominfo Tahun 2024

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 diikuti oleh Sarjana S2. Tingkat Pendidikan juga menggambarkan banyaknya pegawai belum berminat untuk meningkatkan kapasitasnya melalui jalur Pendidikan formal. Perlu dilakukan langkah untuk meningkatkan minat pegawai untuk meningkatkan kapasitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sejauh ini telah cukup memadai untuk menunjang kinerja dan dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada mayoritas berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Aset-aset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

NO	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1.	Alat Angkutan	31	Baik
2.	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	875	Baik
3.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	84	Baik
4.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	Baik
5.	Komputer	797	Baik
6.	Gedung dan Bangunan	5	Baik
7.	Jalan, Jatringan dan Irigasi	19	Baik
8.	Aset tidak berwujud	59	Baik
9.	Aset lain-lain	222	Rusak Berat

Sumber: Diskominfo 2024

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan

dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kominfo Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.47.694.452.738,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.11.367.293.693,- dan belanja langsung sebesar Rp.36.327.159.045,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari seluruhnya berasal dari APBD yang didukung oleh 5 program dan 13 kegiatan.

1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematis penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJIP/manfaat LKJIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Isu-Isu strategis, keadaan pegawai, Keuangan dan sistematis LKJIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Rencana Anggaran Tahun 2024
4. Instrumen Pendukung

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2021, Dinas Kominfo Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026. Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Kominfo Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan daldam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kominfo Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah adalah:

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut,

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Visi: "Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publikberkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP
				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publikyang prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Memantapkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan	Kontribusi sector pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB
				Meningkatnya industry pengolahan	Kontribusi Industri pengolahan terhadapPDRB
				Meningkatkan peran sector pariwisata serta industry kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB
				Memantapkan kualitas pelayanandasar dan infrastruktur dasar	Rasio Konektivitas
					Akses terhadap airminum layak
					Rasio elektrifikasi
					Persentase luas sawahberirigasi
				Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Desa/Kelurahan yangmemiliki akses internet
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Tingkat Kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran
Tingkat pengangguran terbuka					

				Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks ketahanan pangan
3.	Memantapkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya agamis dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya akses terhadap pendidikan	Rata-rata lama sekolah
				Meningkatnya yakesadaran dan pengetahuan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan
				masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	upacara adat
				Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi
				Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks pemberdayaan gender

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kominfo Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kominfo Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah:

1. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	Peringkat Keterbukaan informasi publik	Meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi publik	Persentase Informasi Publik yang disediakan	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral terupdate, valid dan terintegrasi	60%	70%	80%	90%	95%
Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Meningkatnya kualitas layanan administrasi pemerintah dan layanan publik yang terpadu	Persentase Administrasi pemerintahan dan layanan publik yang memanfaatkan TIK	2,7	2,8	3	3,3	3,5
		Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	40% Level 1	43% Level 1	45% Level 1-2	46% Level 2	47% Level 2-3

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks RB OPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60	72	76	85	89
		Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	B	BB	BB	BB	A

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	3	4
1. Meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi publik. 2. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran PPID pembantu seluruh OPD dalam Keterbukaan Informasi • Peningkatan OPD dalam menyediakan data statistik sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> • mengarahkan seluruh perangkat Daerah agar informatif dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat • mengintegrasikan seluruh data dalam satu portal
1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintah dan layanan publik yang terpadu 2. Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. • Penyusunan Kebijakan Internal Layanan SPBE. • Peningkatan keamanan informasi Penyelenggaraan pemerintahan dengan persandian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan optimalisasi Kebijakan Tata Kelola SPBE • Penyusunan dan optimalisasi Kebijakan Layanan SPBE • Tata Kelola Keamanan Informasi Yang Komprehensif dan Implementatif • Peningkatan SDM

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	• Peningkatan kualitas layanan terutama layanan Informasi kepada masyarakat	• Meningkatkan sarana dan Prasarana
2. Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	• Peningkatan kualitas perencanaan dan capaian kinerja	

Sumber : Renstra Dinas Kominfo 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
2	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral terupdate, valid dan terintegrasi	80 %
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Provinsi Jambi	3.0
4.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan infomasi pemerintah daerah	Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	54%

5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 (B)
6.	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	70 (B)

Sumber : Dinas Kominfo 2024

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kominfo Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp.44.122.660.493,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.11.444.101.448,- dan Belanja Langsung Rp.32.678.559.045,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp.47.694.452.738,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 11.367.293.693,- dan Belanja Langsung Rp.36.327.559.045,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp.40.067.858.836,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2024

No	Uraian	Target	Prosentase
I	Belanja Operasi	Rp.46.154.223.409	98.65 %
1	Belanja Pegawai	Rp.9.967.293.693	20.90 %
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.34.786.929.716	72.94 %
3	Belanja Hibah	Rp.1.400.000.000	2.94 %
II	Belanja Modal	Rp. 1.540.229.329	3.23 %
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.887.432.529	1.86 %
2	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.570.644.800	1.20 %
	Jumlah	Rp.47.694.452.738	

Sumber : Dinas Kominfo 2024

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

No.	Sasaran	Anggaran	Presentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	Rp. 20.968.038.119	44%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Rp.224.011.900	0,5%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp.12.759.983.554	26,8%	Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
4.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan infomasi pemerintah daerah	Rp.466.016.320	1%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rp.13,043,818,745	27,3%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
6.	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Rp.232.584.100	0,5%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Jumlah	Rp.47.694.452.7		

Sumber: Dinas Kominfo 2024

2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Komunikasi Provinsi Jambi Tahun 2024, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE terdapat aplikasi umum yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat dan harus digunakan oleh setiap instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat aplikasi khusus seperti pengembangan sistem kepuasan masyarakat yang mendukung penilaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat

secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 berisi :

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya
3. Realisasi Anggaran

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Kominfo Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA/ KODE WARNA
1	2	3	5	6	7	8
1.	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif/ 91	Cukup Informatif/ 79,31	87,15%	

	pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi					
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral terupdate, valid dan terintegrasi	80%	80%	100%	
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3.0	3,05	101,66%	
4.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	54%	58,75%	108,79%	
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 (B)	91,12 (A)	112,49%	
6.	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	70 (B)	70,15 (BB)	100,21%	

Sumber : Dinas Kominfo 2024

Dinas Kominfo Provinsi Jambi memiliki 8 (delapan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Kinerja Lainnya

Pada tahun 2024 Secara detil capaian kinerja Diskominfo Provinsi Jambi dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi.

Tabel 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Kinerja Lainnya

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif/ 91	Cukup Informatif/ 79,31	87,15%

Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan / Sub Kegiatan :

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Untuk memastikan pemerintah daerah melaksanakan amanat tersebut pemerintah pusat memberikan wewenang kepada Komisi Informasi Pusat RI dengan tujuan mengukur transparansi badan publik serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang akuntabel, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dimana sarannya adalah seluruh badan publik (Kementerian, Lembaga, BUMN, PTN, dan Pemerintah Provinsi) di Indonesia.

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrumen yang digunakan tersebut diatas akan menghasilkan nilai dan kualifikasi peringkat Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut :

Tabel 3.4. Kualifikasi Penilaian Keterbukaan Informasi

NO	KUALIFIKASI PERINGKAT	NILAI INDEKS
1	Informatif	90 - 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang informatif	40 – 59,9
5	Tidak informatif	<39

Penilaian dilakukan berdasarkan pedoman peraturan Komisi Informasi

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi.

Berdasarkan hasil penilaian akhir yang termuat dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jambi meraih predikat Cukup Informatif dengan nilai 79,31. Hasil tersebut di atas merupakan akumulasi dari dua tahapan Monev KIP, pengisian kuisisioner melalui sistem aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id dan presentasi uji publik yang secara langsung dilaksanakan di Jakarta dimana masing-masing persentasenya adalah 80%+20%. Rincian nilai per aspek dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5. Penilaian Kuisisioner Keterbukaan Informasi

No	Komponen SAQ	Standar Nilai oleh KI Pusat	Nilai Setelah Verifikasi	Capaian	Jumlah SAQ X 80%
1.	Mengumumkan Informasi Publik	25	25	100%	79,97 X 80%
2.	Menyediakan Dokumen Informasi Publik	10	10	100%	
3.	Pengembangan Website	25	25	100%	
4.	Barang dan Jasa	25	4,5	18%	
5.	Kelembagaan	15	15	100%	
	Total	100	79,7		63,8

Sumber: Komisi Informasi Pusat 2024

Dari rincian penilaian tersebut tergambar bahwa capaian empat komponen berhasil mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sehingga dapat berpeluang mencapai predikat informatif. Namun, pada komponen barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jambi dinilai belum mampu melaksanakan Standar Layanan Informasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa harus memuat dokumen terkait tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahap Pelaksanaan. Setelah dilaksanakan uji publik, Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan nilai 15,51 sehingga total nilai menjadi 79,31 dalam kategori Cukup Informatif atau 87,15% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
89,21 (Menuju Informatif)	77.54 (Cukup Informatif)	79.31 (Cukup Informatif)

Terjadi peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 1,77. Meskipun demikian, hasil yang dicapai belum mencapai target sasaran yang telah ditetapkan yakni informatif atau dengan nilai minimal 90 atau dibawah capaian Tahun 2022 yang telah mencapai 89,21/menuju informatif. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencepai sasaran yakni:

1. Kurangnya komitmen terkait penyediaan Informasi khususnya mengumumkan minimal 2 sampai dengan 3 proyek strategis ke dalam link website PPID Utama atau kedalam link jambiprov.go.id, sementara data tersebut telah dipublikasikan ke dalam google drive. Tim Verifikator tidak dapat menerima publikasi dalam bentuk google drive, seluruh badan publik diwajibkan mengumumkan ke Portal Utama;
2. Terbatasnya ruangan PPID untuk penyelenggaraan keterbukaan Informasi publik;
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menyelenggarakan keterbukaan Informasi publik.

Realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah atau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Target 2026(%)
		2022	2023	2024		
Peringkat Keterbukaan informasi publik	Cukup Informatif	89,21	77,54	79,31	Informatif (95)	83,48%

Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi telah mencapai 83,48% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari capaian Tahun 2022 dan komitmen seluruh stake holder capaian kinerja jangka menengah akan mencapai target utama yakni mencapai predikat informatif yang menandakan implementasi dari keterbukaan

Informasi di Provinsi Jambi dan jaminan kepada publik atas Informasi yang telah disediakan.

Capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Lainnya pada Tahun 2024 sebanyak 22 Pemprov telah mencapai predikat Informatif, dua Pemprov dengan predikat Menuju Informatif, empat Pemprov berpredikat Cukup Informatif termasuk Provinsi Jambi, dua Pemprov berpredikat Kurang Informatif, dan empat Pemprov berpredikat Tidak Informatif. Dengan capaian Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Provinsi Jambi harus melakukan perbaikan dengan strategi yang tepat terutama pada komponen Penyediaan Informasi pengadaan barang dan jasa. Dokumen yang dipersyaratkan telah diupload ke portal utama namun telah melebihi batas waktu.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong capaian indikator peringkat keterbukaan Informasi publik yakni:

1. Keberhasilan empat komponen lainnya yang mencapai 100% yakni sebagai wujud komitmen PPID Utama dalam melaksanakan standar layanan Informasi; dan
2. Portal Utama telah tersedia dan diupdate secara berkala.

Adapun rencana tindak lanjut dan memaksimalkan faktor pendorong, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu melakukan:

1. Memperkuat komitmen atas dasar arahan langsung Gubernur Jambi pada 11 Desember 2024 dengan mengupload Informasi pengadaan barang dan jasa pada portal utama;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika perlu melaksanakan pemeliharaan sarana dan Prasarana Gedung pada Tahun 2025; dan
3. Menyediakan anggaran untuk mengikuti bimtek dan menyediakan pelatihan untuk sumber daya manusia Komunikasi pada Tahun 2025.

Sasaran #2: Meningkatnya kualitas data statistik sektoral

Sasaran ini dicapai melalui program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral

Tabel 3.8 Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral terupdate, valid dan terintegrasi	80%	80%	100%

Upaya mewujudkan satu data Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pemerintah Provinsi Jambi mendorong seluruh Perangkat daerah untuk memenuhi data statistik sektoral. Untuk memenuhi hal tersebut Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Capaian saat ini dari 43 perangkat daerah terdapat 34 Perangkat Daerah yang melakukan pemenuhan data statistik sektoral. Capaian ini sejalan dengan target yang ditetapkan sebesar 80% dari jumlah OPD.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran yakni:

1. Diperlukan identifikasi data statistik sektoral pada setiap OPD;
2. Belum seluruh OPD menunjuk operator data dan menunjukan SK Walidata pendukung;
3. Belum seluruh OPD mengajukan usulan rekomendasi kegiatan statistik kepada Walidata.

Sebagai upaya perbaikan BPS sebagai Pembina data statistik melakukan evaluasi Penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) untuk mengukur capaian kemajuan Penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas Penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang statistik. EPSS dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Statistik Nomor 3 Tahun 2022 dengan keluaran hasil penilaian Indeks Pembangunan Statistik yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan hasil nilai Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 2,68 predikat BAIK. Mengingat Indeks Pembangunan Statistik akan menjadi indikator penilaian reformasi birokrasi maka perlu dipersiapkan untuk Pelaksanaan di tahun berikutnya.

Perbandingan realisasi Persentase Data Statistik Sektor OPD terinventarisasi terupdate, valid dan terintegrasi tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Sasaran 2 Tahun 2022-2024

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
50%	62,79%	80%

Peningkatan terjadi di Tahun 2024 dengan adanya pembinaan yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Upaya implementasi aturan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Menyukkseskan Satu Data Jambi tanggal 27 Desember 2023. Selain itu, komitmen tersebut telah direalisasikan dengan menugaskan operator data pada tiap OPD untuk bimbingan teknis pengolahan data yang akan dipublikasikan dalam website Open Data Jambi pada 26 Desember 2024.

Realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah atau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Target 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral terupdate, valid dan terintegrasi	50%	50%	62,79%	80%	95%	84,21%

Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi Tahun 2024

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas data statistik sektoral dilakukan dengan mendorong seluruh OPD untuk memproduksi data yang sesuai dengan kaidah statistik. Hal ini juga dilakukan dengan pembinaan oleh BPS melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dengan beberapa rekomendasi yakni:

1. Pemerintah Provinsi Jambi perlu menyusun SOP/Petunjuk teknis yang lebih rinci terkait standar data statistik, metadata statistik, interoperabilitas data, serta penerapan kode referensi;
2. Membuat reuiu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip

SDI serta melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan;

3. Perlu melakukan identifikasi kebutuhan data dari setiap dinas/instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan memastikan akurasi data dan konsistensi statistik yang dihasilkan dengan melaksanakan tahapan pemeriksaan akurasi data dan konsistensi statistik;
4. Perlu peningkatan aspek perencanaan data khususnya dalam pendefinisian kebutuhan statistik dengan melakukan Penyusunan daftar data;
5. Perlu adanya reviu portal data JDAC, dokumen kebijakan yang diterbitkan, Analisis Beban Kerja dan pemutakhiran jabatan yang memuat perencanaan dan realisasi pemenuhan SDM bidang statistik;
6. Mengaktifkan Forum Satu Data Indonesia dengan melakukan pembahasan Rencana Aksi Daerah di Provinsi Jambi;
7. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan literasi data oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Sasaran #3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran ini dicapai melalui program Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Pengelolaan e-goverment diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Penatalaksanaan dan pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi
 - b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
 - c. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Tabel 3.11 Sasaran 3

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,0 (Baik)	3,05 (Baik)	101,66%

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan/penerapan SPBE di K/L/Pemda. Indeks SPBE diperoleh dari hasil evaluasi SPBE terhadap K/L/Pemda yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari penerapan SPBE di setiap K/L/Pemda. Pengukuran Nilai Indeks SPBE tahun 2024 menggunakan PermenPANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut juga dijabarkan predikat penilaian SPBE yang mempresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Tim Kementerian PANRB bersama Asesor Eksternal telah melakukan verifikasi, validasi dan penilaian pelaksanaan SPBE dengan hasil yang tertera pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi Jambi tercatat di angka Indeks 3,05 dengan kategori baik. Rincian penilaian per aspek dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.13 Nilai Domain dan Apek SPBE Provinsi Jambi Tahun 2024

NAMA INDEKS	NILAI 2024
Domain 1 – Kebijakan SPBE	2,30
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,30
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	2,40
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	2,25
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	3,00
Domain 3 - Manajemen SPBE	2,18
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	2,00
Aspek 6 - Audit TIK	2,67
Domain 4 - Layanan SPBE	3,95
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,80
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,17

Berdasarkan tabel 3.13 menunjukkan bahwa Domain dengan capaian nilai tertinggi yakni pada Domain 4/ Layanan SPBE dengan nilai 3,95 dan nilai Domain terendah pada Domain 3/Manajemen SPBE. Jika dilihat lebih lanjut nilai aspek terendah pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE sebesar 2,00 diikuti oleh Aspek Perencanaan Strategis dan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendapatkan nilai 2,25. Meskipun demikian terdapat penurunan dibandingkan capaian Tahun 2023 dengan adanya penurunan di beberapa Domain dan Aspek penilaian.

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022-2024

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
2,19 (Cukup)	3,31 (Baik)	3,05 (Baik)

Capaian nilai Indeks SPBE Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,26. Adapun faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terdapat kelemahan pada pemenuhan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Jaringan Intra, Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, dan Kebijakan Audit TIK;

2. Pada Aspek Perencanaan Strategis belum memenuhi kaidah dan muatan secara menyeluruh;
3. Belum dapat menunjukkan bukti dukung berkaitan dengan proses pembangunan aplikasi SPBE yang telah dikonsultasikan kepada unit kerja/Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK dan minimnya bukti dukung pemanfaatan penghubung layanan; dan
4. Pada penerapan manajemen SPBE, bukti dukung yang ditampilkan belum diikuti oleh program kegiatan yang terarah dan terencana;

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan seluruh OPD yang ditunjukkan oleh pemanfaatan/penggunaan aplikasi umum sehingga dapat menunjang layanan Administrasi pemerintahan berbasis elektronik didukung dengan aplikasi khusus yang telah dibangun; dan
2. Penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik sudah dilaksanakan dengan adanya pemanfaatan SP4N Lapor, JDAC, JDIHN, OSS, E-Samsat dan SIMRSJ.

Realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah atau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

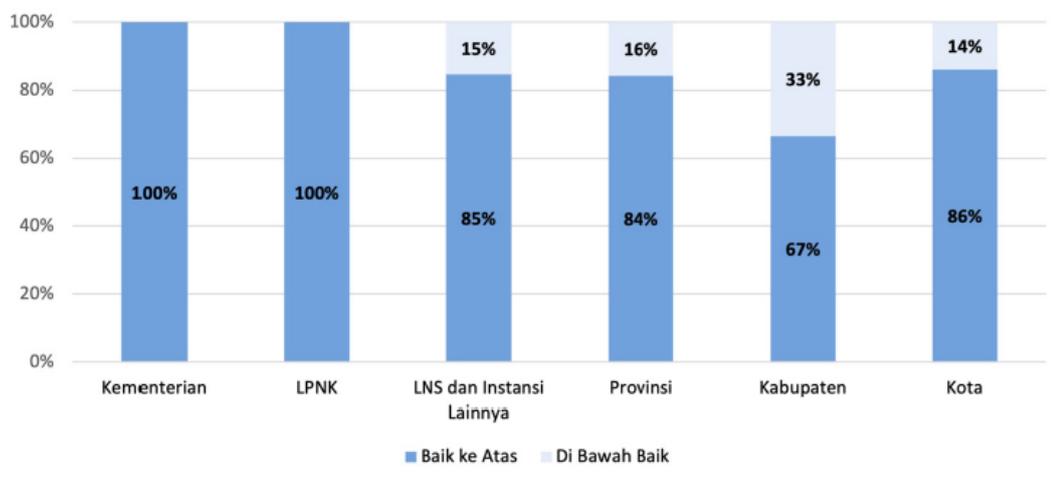
Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Target 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,16 (Cukup)	2,19	3,31	3,05	3,5	87,14%

Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi Tahun 2024

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, capaian kinerja mencapai 87,14%. Capaian ini masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan meskipun terjadi penurunan dari Tahun 2023. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memerlukan kesinambungan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan seluruh Perangkat daerah. Capaian Pemerintah Provinsi Jambi juga sama dengan 84% Pemerintah Provinsi Lainnya yang mendapatkan predikat baik sebagaimana

tergambar pada grafik 3.15.

Grafik 3.1. Distribusi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Sumber: Kemenpan RB RI Tahun 2024

Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat ditingkatkan dengan strategi:

1. Memperkuat keunggulan yang dimiliki pada aspek layanan Administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan digital;
2. Memperbaiki kekurangan terutama pada aspek kebijakan internal, aspek perencanaan strategis dan aspek penerapan manajemen; dan
3. Perlu memperkuat komitmen penerapan SPBE melalui pemenuhan dan kelengkapan aspek perencanaan strategis dan aspek kebijakan internal seperti kebijakan arsitektur SPBE, kebijakan internal layanan jaringan intra, kebijakan system penghubung layanan, kebijakan manajemen Keamanan Informasi dan kebijakan audit TIK.

Sasaran #4: Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah

Sasaran ini dicapai melalui program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Tabel 3.16 Sasaran 4

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Keamanan Informasi	54%	58,75%	108,79%

Penyelenggaraan persandian di Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di bidang persandian yakni; (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan (2) penetapan pola hubungan Komunikasi antar Perangkat daerah provinsi. Pada pelaksanaannya alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan Informasi di organisasi Pemerintah Daerah menggunakan penilaian Indeks KAMI. Badan Siber dan Sandi Negara RI ditunjuk sebagai penilai melakukan verifikasi terhadap penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi pada delapan aspek yakni :

1. Tata Kelola;
2. Pengelolaan Resiko;
3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
4. Pengelolaan Aset;
5. Teknologi dan Keamanan Informasi;
6. Pengamanan keterlibatan pihak ketiga;
7. Pengamanan layanan infrastruktur awal; dan
8. Perlindungan data pribadi.

Dari hasil penilaian mandiri total nilai dengan dasar kelengkapan penerapan standar ISO 27001 sesuai kategori berada pada nilai 518. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh Badan Riset dan Sandi Negara RI diperoleh nilai yang lebih rendah yakni 379. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran tercantum dalam laporan onsite Assesment Indeks KAMI yang terbatas. Jika dilihat dari capaian kinerja dari beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Capaian kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
51.47%	52%	58.75%

Peningkatan capaian kinerja terjadi cukup signifikan pada Tahun 2024.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung terjadinya peningkatan yakni:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi telah menyiapkan dokumen pendukung terutama kebijakan dan prosedur yang diperlukan pada penyelenggaraan persandian;
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercantum dalam SOTK organisasi dan SK Gubernur tentang pembentukan tim CSIRT; dan
3. Pelaksanaan Keamanan secara berkala didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur keamanan dan sumber daya manusia yang melakukan pengawasan secara rutin.

Realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah atau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Target 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	Level 1	51,47%	52%	58,75%	47%	125%

Capaian sasaran Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah telah mencapai 125% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan merupakan prestasi yang sangat baik untuk kepentingan organisasi. Meskipun melampaui target, pada Tahun 2025 terjadi perubahan penilaian yang berdampak pada naiknya jumlah yang dinilai dari 645 menjadi 918 atau menggunakan Indeks KAMI 5.0. dengan adanya perubahan tersebut perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap target yang ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian Tahun 2024 dan target nasional.

Pemerintah Provinsi Jambi perlu mendorong terwujudnya sistem

manajemen Keamanan Informasi secara optimal dengan mempertimbangkan tiga komponen yakni Sumber Daya Manusia, Proses, dan teknologi. Peningkatan tersebut dilakukan dengan memenuhi:

1. Spesialisasi SDM pada penyelenggaraan Keamanan Informasi dengan merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Keamanan Informasi, Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi;
2. Menyiapkan berbagai aspek Proses dengan mendorong perlindungan data pribadi yang digunakan pada proses kerja, mempertimbangkan aspek Keamanan Informasi pada setiap kebijakan dan menyusun pengelolaan resiko SPBE;
3. Pada Aspek Teknologi perlu dilakukan pengembangan pada Standar Keamanan dan pengawasan secara berkala dan meningkatkan kehandalan Keamanan dengan melibatkan pihak independen untuk mengkaji kehandalan Keamanan Informasi secara rutin.

Sasaran #5: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 3.19 Sasaran 5

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	81 (B)	91,12 (A)	112,49%

Sasaran ini dicapai melalui program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Dimana salah satu kegiatan yang harus ada adalah dengan melakukan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan dan mengacu pada kategori mutu pelayanan, maka diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar 91,12 meningkat dari tahun 2023 sebesar 79,26 dan berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31-100. Rata-rata dari semua unsur pelayanan, kinerja pelayanannya adalah sangat baik.

Tabel 3.20 Pengukuran IKM

No.	Unsur Pelayanan	Nilar Rata-Rata	NRR X 25
U1	Persyaratan pelayanan	3,66	91,5
U2	Prosedur pelayanan	3,68	92
U3	Waktu pelayanan	3,49	87,3
U4	Biaya/tarif pelayanan	3,9	97,5
U5	Produk/hasil pelayanan	3,65	91,3
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3,62	90,5
U7	Perilaku petugas pelayanan	3,65	91,3
U8	Kualitas sarana dan Prasarana	3,4	85
U9	Penanganan pengaduan pelayanan	3,77	94,25
Indeks Kepuasan Masyarakat		3,64	91,12

Berdasarkan tabel IKM per unsur pada Diskominfo Provinsi Jambi Tahun 2024, nilai rata-rata untuk setiap unsur pelayanan berada dalam rentang 3.40

hingga 3.90. Unsur "Kompetensi", "Jangka Waktu" dan "Sarana Prasarana" mendapatkan nilai lebih rendah, masing-masing 3,62, 3.49 dan 3.40, namun masih masuk dalam kategori "Sangat Baik". Unsur lainnya, seperti "Biaya/Tarif" dan "Pengaduan", memiliki nilai tertinggi, yakni 3.90 dan 3.77.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana menjadi unsur dengan nilai terendah, menunjukkan adanya ketidakpuasan dari pengguna layanan terhadap fasilitas yang tersedia. Aduan yang masuk menyoroti perlunya peningkatan pada kebersihan, terutama di area kantor. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam ruang tunggu. Kemudian, kurangnya infografis ataupun pemberitahuan terkait dengan alur pelayanan yang ada pada Diskominfo.
- Waktu penyelesaian mendapatkan nilai terendah kedua, yang mengindikasikan adanya keluhan terhadap lamanya proses penyelesaian layanan. Permasalahan ini memperlihatkan perlunya perbaikan dalam efisiensi dan kecepatan layanan yang diberikan, sehingga pengguna tidak mengalami keterlambatan yang berlarut-larut.
- Kompetensi pelaksana menjadi unsur dengan nilai ketiga terendah, yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan dan fokus dalam pelayanan. Masukan yang diterima menekankan kurangnya pengetahuan pegawai mengenai alur pelayanan di Diskominfo.. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan pelatihan dan pengembangan bagi petugas, agar mampu memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan pengguna.

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
87,434/ Baik	79,26/ Baik	91,12/ Sangat Baik

Peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat adanya faktor-faktor pendorong berupa:

1. Menggunakan Sistem Informasi berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memudahkan proses survei dan pengolahan data;
2. Petugas yang melakukan survei telah dibekali dengan persiapan sehingga dapat terlaksana dengan baik;
3. Laporan SKM telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan organisasi.

Realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah atau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Target 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	87,43	79,26	91,12	94	97%

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tahun 2024 terhadap target 2026 sebesar 97% atau sesuai dengan perkiraan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini perlu ditingkatkan dengan melakukan perbaikan berdasarkan kelemahan yang ditemui pada hasil survei dengan mempertimbangkan saran/kritik dari responden.

Sasaran #6: Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja

Tabel 3.23 Sasaran 6

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai AKIP	70 (B)	70,15 (BB)	100,21%

Sasaran ini dicapai melalui program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi SKPD

Nilai Akuntabilitas Kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.24 Nilai Akuntabilitas Kinerja

No.	Nilai	Predikat	Interpretasi
1.	>90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
2.	>80 – 90	A	Memuaskan
3.	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4.	>60 – 70	B	Baik
5.	>50 - 60	CC	Cukup (Memadai)
6.	>30 – 50	C	Kurang
7.	>0 - 30	D	Sangat Kurang

Penilaian SAKIP dilakukan pada tahun berikutnya sehingga pada proses pembuatan laporan kinerja instansi Pemerintah menggunakan hasil penilaian SAKIP tahun 2023 dengan hasil 70,15 Kategori Sangat Baik dengan predikat BB. Untuk menerapkan akuntabilitas yang lebih efektif, rekomendasi yang telah diberikan antara lain:

- 1) Agar Perjanjian kinerja pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Pelaksana disusun dan diformalkan paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan;
- 2) Agar Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda Paling Lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi;
- 3) Agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi pada pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;
- 4) Agar mengoptimalkan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja, serta perbaikan dan peningkatan kinerja;

- 5) Agar melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) triwulan 1, 2, 3, dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui pimpinan OPD yang disertai dengan jadwal evaluasi membuat notulensi rapat mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas;
- 6) Agar Pimpinan selalu terlibat dalam mengukur capaian kinerja sebagai pengambil keputusan;
- 7) Agar perjanjian Eselon II memperhatikan sasaran strategis pada Perangkat Daerah yang berorientasi hasil sesuai dengan level jabatannya, dan indikator kinerja yang cukup untuk mengukur sasaran kinerjanya;
- 8) Agar Perangkat daerah membuat Peraturan/SK/SOP/ Petunjuk Teknis mengenai pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- 9) Agar Diagram Cascading diformalkan.

Perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25 Realisasi Tahun 2022-2026

Realisasi 2022 (SAKIP 2021)	Realisasi 2023 (SAKIP 2022)	Realisasi 2024 (SAKIP 2023)
63,49/B/baik	62,11/ B/ Baik	70,15/ BB/ Sangat Baik

Terjadi peningkatan nilai yang menunjukkan adanya perbaikan pada akuntabilitas kinerja. Namun jika dilihat dari target jangka menengah yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan memberikan dampak pada capaian kinerja organisasi. Realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah atau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Target 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Nilai AKIP	B	63,49/B	62,12/B	70,15/BB	A (>80)	87,68%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja Tahun 2024 terhadap target 2026 sebesar 87,68%. Diperlukan upaya

peningkatan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar Rp.47.694.452.738, - (95.87%) dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.33.395.871.188,- (97.03%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.12.328.725.175 (92.86%).

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi %
1		2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Akip / Predikat Akip	13,276,402,845	12,328,725,174	92,59
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas perencanaan OPD	232.584.100	173.497.069	74,60
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	39.796.500	28.009.000	70.38
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah dokumen laporan	192.787.600	145.488.069	75.47
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.795.948.093	9.355.316.751	95.50
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	9.509.133.693	9.180669.871	96.55
	2 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	280.814.400	170.206.880	60.61

			Keuangan SKPD				
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	6.000.000	4.440.000	74.00
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		309.623.200	201.677.698	65.14
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/latihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	309.623.200	201.677.698	65.14
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		823,346,997	645,964,228	78.46
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	169,534,201	141,348,500	83.37
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24,960,000	11,877,000	47.58
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	19,890,300	8,367,500	42.07
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	29,204,496	15,042,660	51.51
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	579,758,000	469,328,568	80.95
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		119,050,000	117,875,000	99.01

	1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		119,050,000	117,875,000	99.01
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,564,020,055	1,546,892,153	98.90
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000	400,000	40.00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,556,520,468	1,543,469,069	99.16
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6,499,587	3,023,084	46.51
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		431,830,400	287,502,275	66.58
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	392,560,400	287,502,275	73.24
	2	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	39,270,000	0	0.00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Presentase peningkatan kualitas komunikasi	20,968,038,119	20,599,603,241	98,24

			publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumber daya dan kemitraan komunikasi publik			
	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	20,968,038,119	20,599,603,241	98.24
	1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	217,995,650	165,920,031	76.11
	2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	17,229,784,315	17,074,407,385	99.10
	3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	213,034,900	149,675,500	70.26
	4	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1,663,150,887	1,622,309,530	97.94
	5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	145,999,600	119,091,585	81.57
	6	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di	1,498,072,767	1,468,199,210	98.01

				Daerah			
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke Jaringan Internet Pemerintah	12,759,983,554	12,240,422,438	95,93
	1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Li Daerah Provinsi		Tersedianya domain dan sub domain yang terstruktur	118,063,225	63,904,925	54.13
		1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan dan nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	118,063,225	63,904,925	54.13
	2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pe Provinsi		Persentase perangkat dan sistem informasi penunjang penerapan SPBE di Provinsi Jambi	12,641,920,329	12,176,517,513	96.32
		1 Penatalaksanaan dan pengawasane-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	128,214,600	92,441,367	72.10

		2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	600,155,200	569,446,203	94.88
		3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	11,444,134,164	11,055,694,333	96.61
		4	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	469,416,365	458,935,610	97.77
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Persentase ketersediaan data statistik sektoral	224,011,900	169,697,750	75,75
	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di LProvinsi		Persentase Pemanfaatan Statistik sektoral Dalam Perencanaan Dalam Ekspose Pembangunan Daerah	224,011,900	169,697,750	75.75
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	104,011,900	96,705,550	92.98

	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	70,000,000	61,065,800	87.24
	3	Membangun Metadata StatistikSektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	50,000,000	11,926,400	23.85
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Indeks Kematangan Keamanan Informasi	466,016,320	386,147,759	82,86
	1	Penyelenggaraan Persandian untuk PePemerintah Daerah Provinsi	Mewujudkan Keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraa n system pemerintahanbe rbasis eletronik (SPBE) dan Non Elektronik	414,283,820	335,823,279	81.06
	1	Penetapan Kebijakan Tata KelolaKeamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi, dan kebijakan jaring komunikasi sandi Pemerintah daerah provinsi	18,714,720	13,885,934	74.20
	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi PemerintahDaerah Provinsi	Jumlah Dokumen Audit Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Jambi	135,569,100	130,631,245	96.36
	3	Pelaksanaan Keamanan InformasiPemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	90,000,000	44,510,750	49.46

			Provinsi dan Kab/Kota				
		4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	170,000,000	146,795,350	86.35
	2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Perangkat Daerah Provinsi		Terlaksananya Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jambi	51,732,500	50,324,480	97.28
		1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	51,732,500	50,324,480	97.28
					47,694,452,738	45,724,596,362	95.87

Tabel 3.28 Analisis efisiensi Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR	%CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	81	98.24
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral terupdate, valid dan terintegrasi	100	75.75
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	102	95.93

4.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	109	82.86
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	112	92.91
6.	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	100	74.60
RATA -RATA			101	95,87
EFISIENSI		CAPAIAN >101% dengan serapan anggaran 95,87%	4,13% efisiensi anggaran atauRp. 1.969.856.376,-	

Sumber: Dinas Kominfo 2024

Berdasarkan tabel 3.28 di atas, kinerja sasaran strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 4.13%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana. Namun perlu menjadi perhatian terhadap indikator peringkat keterbukaan Informasi publik karena capaian realisasi Keuangan lebih besar dari pada capaian kinerja.

BAB 4

Penutup

Bab 4 berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas kominfo pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2021-2026.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kominfo tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian reealisasi di atas 100% sebanyak 4 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja pada capaian indikator peringkat keterbukaan Informasi publik yang belum mencapai target 100%. Meskipun begitu terhadap indikator lainnya yang telah mencapai target maupun melebihi, juga perlu dilakukan strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan kinerja.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Memastikan Penyediaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa telah sesuai dengan standar layanan informasi.
2. Melakukan penyesuaian target pada program Penyelenggaraan statistik sektoral dengan Indeks Pembangunan Statistik dikarenakan akan menjadi penilaian Reformasi Birokrasi dan menjadi IKU Kemendagri.
3. Menyediakan regulasi atau prosedur untuk mendukung pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.

4. Menindaklanjuti rekomendasi LHE AKIP untuk perbaikan nilai SAKIP.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Ariansyah, M.E

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. Al Haris, S.Sos, M.H.

Jabatan : Gubernur Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

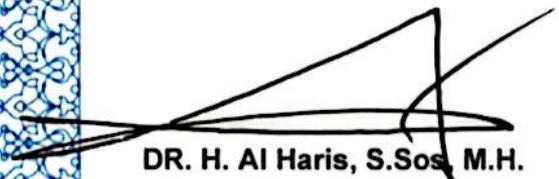
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

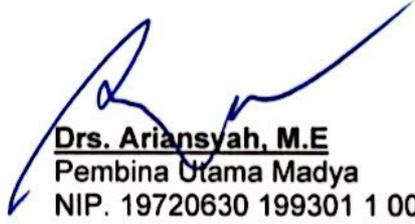
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 18 Januari 2024

Pihak Kedua,
Gubernur Jambi

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jambi


DR. H. Al Haris, S.Sos, M.H.

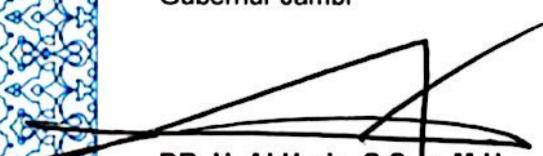

Drs. Ariansyah, M.E
Pembina Utama Madya
NIP. 19720630 199301 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemprov Jambi	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
2	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral terupdate, valid dan terintegrasi	80%
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Provinsi Jambi	3.0
4.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	54%
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 (B)
6.	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	70 (B)

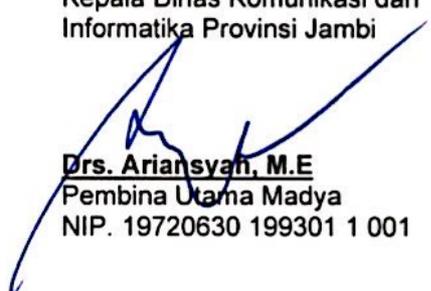
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.395.602.600,-	
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 17.317.045.484,-	
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 12.719.984.189,-	
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 224.011.900 ,-	
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 466.016.320,-	
	JUMLAH	Rp. 44.122.660.493,-	

Pihak Kedua,
Gubernur Jambi


DR. H. Al Haris, S.Sos, M.H.

Jambi, 18 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi


Drs. Ariansyah, M.E
Pembina Utama Madya
NIP. 19720630 199301 1 001



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 52 /KEP/KIP/XII/2024

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2021 NOMOR 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Keputusan Komisi Informasi Nomor 50/KEP/KIP/VII/2024 tentang Petunjuk Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
- KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari tujuh kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- KETIGA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah ditetapkan 3 (tiga) terbaik nasional sebagaimana termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- KEEMPAT : Keputusan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat dan tidak dapat diganggu gugat.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2024

**KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA,**



DONNY YOESGIANTORO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: 52 /KEP/KIP/XII/2024
 TENTANG
 HASIL MONITORING DAN EVALUASI
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2024

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2024**

1. Informatif

KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	99,41
2.	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	99,15
3.	KEMENTERIAN HUKUM	98,56
4.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	98,47
5.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	98,16
6.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	98,05
7.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	97,89
8.	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	97,87
9.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	97,73
10.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	97,63
11.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	97,60
12.	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	97,48
13.	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	97,40
14.	KEMENTERIAN KEUANGAN	97,37
15.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	97,00
16.	KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA /BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	96,97
17.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	96,63
18.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	96,38
19.	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	96,33
20.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	95,93
21.	KEMENTERIAN PERTANIAN	95,88
22.	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	95,80
23.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	95,47
24.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	95,45
25.	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	95,42

26.	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	95,20
27.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	94,77
28.	KEMENTERIAN AGAMA	94,52
29.	KEMENTERIAN PERTAHANAN	94,46
30.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	94,20
31.	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	92,00
32.	KEMENTERIAN KESEHATAN	90,89

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	96,63
2.	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	96,46
3.	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	96,15
4.	RADIO REPUBLIK INDONESIA	96,10
5.	MAHKAMAH AGUNG	96,09
6.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	95,97
7.	OTORITAS JASA KEUANGAN	95,97
8.	KOMISI YUDISIAL	95,72
9.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	95,71
10.	BANK INDONESIA	95,49
11.	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	95,37
12.	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	95,10
13.	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	95,07
14.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	94,77
15.	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	94,67
16.	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan	94,67
17.	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	94,47
18.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	94,20
19.	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	94,19
20.	SEKRETARIAT KABINET	93,76
21.	MAHKAMAH KONSTITUSI	93,69
22.	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	92,81
23.	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	92,01
24.	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	91,75
25.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	91,40

LEMBAGA NON STRUKTURAL

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN PENGAWAS PEMILU	98,43
2.	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	97,40
3.	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL	97,38
4.	KOMISI PEMILIHAN UMUM	97,00
5.	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	95,43
6.	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	95,00
7.	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	94,90

8.	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	93,00
----	---	-------

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	98,52
2.	PEMERINTAH ACEH	98,31
3.	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	98,24
4.	PEMERINTAH PROVINSI BALI	98,02
5.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	97,73
6.	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	97,57
7.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	97,50
8.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	97,45
9.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	97,33
10.	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	97,07
11.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	96,94
12.	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	96,87
13.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	96,60
14.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	95,74
15.	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	95,27
16.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	94,62
17.	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	94,30
18.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	93,91
19.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	92,31
20.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	91,91
21.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	90,97
22.	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU	90,23

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	99,08
2.	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	99,05
3.	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	98,89
4.	PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)	98,80
5.	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	98,31
6.	PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	98,20
7.	PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)	98,00
8.	PT. PERTAMINA (PERSERO)	97,97
9.	PT. DANAREKSA (PERSERO)	97,97
10.	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	97,82
11.	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	97,79
12.	PERUM JASA TIRTA I	97,67
13.	PT. TASPEN (PERSERO)	97,43
14.	PT. REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)	97,20
15.	PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK	97,19
16.	PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	97,10
17.	PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)	96,80
18.	PERUM PERUMNAS	96,60
19.	PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)	96,14
20.	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	96,09

21.	PERUM LPPNPI	96,07
22.	PERUM JASA TIRTA II	95,87
23.	PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK	95,70
24.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK	95,57
25.	PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK	95,36
26.	PERUM BULOG	95,07
27.	PT. AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)	94,87
28.	PERUM DAMRI	94,50
29.	PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)	94,30
30.	PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK	94,20
31.	PERUM LKBN ANTARA	94,18
32.	PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK	94,15
33.	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	93,74
34.	PT. BIO FARMA (PERSERO)	91,51
35.	PERUM PERHUTANI	91,01
36.	PT. ASABRI (PERSERO)	90,53

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	98,97
2.	UNIVERSITAS GADJAH MADA	98,92
3.	UNIVERSITAS AIRLANGGA	98,77
4.	UNIVERSITAS PADJADJARAN	98,75
5.	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	98,51
6.	UNIVERSITAS ANDALAS	98,51
7.	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	98,50
8.	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	98,37
9.	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	98,33
10.	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	98,29
11.	UNIVERSITAS INDONESIA	98,00
12.	UNIVERSITAS LAMPUNG	97,97
13.	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	97,90
14.	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	97,73
15.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG	97,50
16.	UNIVERSITAS MATARAM	97,40
17.	UNIVERSITAS RIAU	97,39
18.	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	97,27
19.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	97,13
20.	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	97,08
21.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	96,97
22.	UNIVERSITAS JEMBER	96,45
23.	UNIVERSITAS BENGKULU	96,39
24.	INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN	96,35
25.	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI	96,28
26.	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA	96,27
27.	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	95,91
28.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG	95,80
29.	UNIVERSITAS TIDAR	95,53
30.	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	95,37
31.	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	95,27

32.	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	94,97
33.	UNIVERSITAS SILIWANGI	94,60
34.	INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG	94,23
35.	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	91,28

PARTAI POLITIK		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	98,18
2.	PARTAI Keadilan Sejahtera	97,43
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-PERJUANGAN)	96,87
4.	PARTAI DEMOKRAT	96,57

2. Menuju Informatif

KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	81,96
2.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	81,80
3.	KEMENTERIAN SOSIAL	79,53

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORIS	86,74
2.	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	85,35
3.	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	83,83
4.	PERPUSTAKAAN NASIONAL	82,08
5.	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	80,17

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	89,06
2.	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	86,80

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO)	82,13
2.	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	81,93
3.	PT. POS INDONESIA (PERSERO)	81,40
4.	PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)	80,21

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	85,89
2.	UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	85,70
3.	UNIVERSITAS TERBUKA	83,94
4.	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	82,67
5.	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	81,74

3. Cukup Informatif

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	78,92
2.	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	78,63
3.	BADAN INTELLJEN NEGARA	60,00

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL	78,75
2.	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	76,45

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	79,31
2.	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	78,04
3.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	77,64
4.	PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO	76,84

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO)	79,92
2.	PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO)	75,57
3.	PT. BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)	75,48

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS UDAYANA	79,05
2.	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	78,73
3.	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	78,25
4.	UNIVERSITAS HASANUDDIN	77,57
5.	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	77,29
6.	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	77,29
7.	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA	76,01

PARTAI POLITIK		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	67,77
2.	PARTAI AMANAT NASIONAL	67,71

4. Kurang Informatif

KEMENTERIAN		
--------------------	--	--

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	54,00

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN PUSAT STATISTIK	55,92
2.	BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	43,64
3.	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	42,00
4.	KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA	40,00

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI	57,84
2.	BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE	56,24
3.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	52,20

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	58,88
2.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	56,68

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)	54,56
2.	PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	49,16
3.	PT. MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)	48,40
4.	PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)	48,28
5.	PT. INDRA KARYA (PERSERO)	44,04

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	58,52
2.	UNIVERSITAS MULAWARMAN	56,20
3.	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	55,76
4.	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	53,20
5.	UNIVERSITAS DIPONEGORO	51,24
6.	UNIVERSITAS NEGERI MANADO	48,76
7.	UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG	46,60
8.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	46,04

5. Tidak Informatif

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	38,72
2.	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	32,04

3.	TENTARA NASIONAL INDONESIA	23,16
----	----------------------------	-------

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	38,84
2.	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	38,16
3.	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	22,28
4.	KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	21,96
5.	LEMBAGA SENSOR FILM	12,80
6.	KOMISI PENYIARAN INDONESIA	9,20
7.	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	6,00
8.	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	0,60
9.	AKADEMISI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	0,00
10.	BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL	0,00
11.	DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL	0,00
12.	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0,00
13.	DEWAN PERS	0,00
14.	DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL	0,00
15.	KOMISI KEJAKSAAN RI	0,00
16.	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	0,00
17.	KOMITE AKREDITASI NASIONAL	0,00

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT	39,68
2.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	37,92
3.	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	37,84
4.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA	29,44

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)	39,52
2.	PT. VIRAMA KARYA (PERSERO)	29,32
3.	PT. PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)	21,72
4.	PT. YODYA KARYA (PERSERO)	8,64
5.	PT. DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO)	6,80
6.	PT. DJAKARTA LLOYD (PERSERO)	1,00
7.	PT. BOMA BISMA INDRA (PERSERO)	0,40
8.	PT. SEMEN KUPANG (PERSERO)	0,00
9.	PT. AMARTA KARYA (PERSERO)	0,00
10.	PT. INDAH KARYA (PERSERO)	0,00
11.	PT. PDI PULAU BATAM (PERSERO)	0,00
12.	PT. BOMA BISMA INDRA (PERSERO)	0,00
13.	PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)	0,00
14.	PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)	0,00

15.	PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)	0,00
16.	PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)	0,00
17.	PT. PRIMISSIMA (PERSERO)	0,00

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	UNIVERSITAS JAMBI	34,00
2	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA	29,52
3	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG	28,84
4	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JURAI SIWO METRO	25,56
5	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA	24,76
6	INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG	23,56
7	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	18,12
8	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS	14,56
9	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	12,92
10	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA	12,16
11	SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI	10,80
12	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN	8,28
13	UNIVERSITAS MUSAMUS	5,56
14	INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH	3,36
15	UNIVERSITAS SULAWESI BARAT	3,00
16	UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA	1,60
17	UNIVERSITAS NEGERI PAPUA	0,00
18	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	0,00
19	SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA	0,00
20	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG	0,00
21	SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA	0,00
22	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU	0,00
23	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG	0,00
24	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA	0,00
25	UNIVERSITAS TADULAKO	0,00
26	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE	0,00
27	INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM	0,00
28	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	0,00
29	UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA	0,00
30	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO	0,00
31	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	0,00
32	UNIVERSITAS CENDRAWASIH	0,00
33	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON	0,00
34	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG	0,00
35	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	0,00

36	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK JAYAPURA	0,00
37	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	0,00
38	UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA	0,00
39	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	0,00
40	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TENGGU DIRUNDENG	0,00
41	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO	0,00
42	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI	0,00
43	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM	0,00
44	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS	0,00
45	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA	0,00
46	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO	0,00
47	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	0,00
48	INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE	0,00
49	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA	0,00
50	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GAJAH PUTIH	0,00
51	UNIVERSITAS HALUOLEO	0,00
52	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	0,00
53	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JURAI SIWO METRO	0,00
54	SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI	0,00
55	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG	0,00
56	UNIVERSITAS PALANGKARAYA	0,00
57	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO	0,00
58	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA	0,00
59	INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA	0,00
60	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	0,00
61	UNIVERSITAS NUSA CENDANA	0,00
62	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL	0,00
63	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK	0,00
64	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR	0,00
65	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL	0,00
66	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU	0,00
67	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG	0,00
68	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	0,00
69	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	0,00
70	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA	0,00
71	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA	0,00
72	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN	0,00
73	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	0,00
74	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA	0,00
75	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO	0,00
76	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON	0,00
77	UNIVERSITAS KHAIRUN	0,00
78	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	0,00

79	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU	0,00
80	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA	0,00
81	UNIVERSITAS PATTIMURA	0,00
82	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN	0,00
83	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE	0,00
84	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH	0,00
85	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE	0,00
86	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON	0,00
87	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	0,00
88	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE	0,00
89	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE	0,00
90	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	0,00
91	INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA	0,00
92	UNIVERSITAS SAMUDRA	0,00
93	SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WJAYA	0,00
94	UNIVERSITAS TIMOR	0,00

PARTAI POLITIK		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI NASDEM	29,00
2.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	0,00
3.	PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN	0,00

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 52 /KEP/KIP/XII/2024
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2024

**TERBAIK NASIONAL
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
ARKAYA WIWARTA PRAJANUGRAHA**

- ❖ KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
- ❖ UNIVERSITAS NEGERI MALANG
- ❖ BANK RAKYAT INDONESIA



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2024, perlu menetapkan hasil kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 706); dan
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 299 Tahun 2024 tentang Lokus Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 615 (*enam ratus lima belas*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur atau pemisahan, dapat menggunakan hasil evaluasi mengikuti nomenklatur instansi sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai capaian kinerja tahun 2024 dan acuan untuk perencanaan kinerja tahun 2025.
- KEEMPAT : Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dihimbau untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

RINI WIDYANTINI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

HASIL EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Hasil Evaluasi SPBE Kementerian

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	3,08	Baik
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4,00	Sangat Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3,46	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	3,92	Sangat Baik
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3,98	Sangat Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	4,64	Memuaskan
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,63	Sangat Baik
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4,33	Memuaskan
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,75	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	4,46	Memuaskan
11	Kementerian Dalam Negeri	4,21	Memuaskan
12	Kementerian Luar Negeri	3,93	Sangat Baik
13	Kementerian Pertahanan	3,88	Sangat Baik
14	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,36	Memuaskan
15	Kementerian Keuangan	4,74	Memuaskan
16	Kementerian Pertanian	4,00	Sangat Baik
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,60	Sangat Baik
18	Kementerian Perhubungan	4,60	Memuaskan
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4,02	Sangat Baik
20	Kementerian Kesehatan	3,73	Sangat Baik
21	Kementerian Agama	4,63	Memuaskan
22	Kementerian Ketenagakerjaan	3,42	Baik
23	Kementerian Sosial	3,58	Sangat Baik
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,99	Sangat Baik
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,99	Sangat Baik
26	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4,75	Memuaskan
27	Kementerian Perdagangan	4,22	Memuaskan
28	Kementerian Perindustrian	3,44	Baik
29	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4,35	Memuaskan
30	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,68	Memuaskan
31	Kementerian Sekretariat Negara	3,95	Sangat Baik
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4,15	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
33	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	3,54	Sangat Baik
34	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	4,10	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Siber dan Sandi Negara	4,06	Sangat Baik
2	Badan Kepegawaian Negara	4,19	Sangat Baik
3	Badan Pusat Statistik	4,53	Memuaskan
4	Arsip Nasional Republik Indonesia	3,88	Sangat Baik
5	Badan Informasi Geospasial	3,88	Sangat Baik
6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3,51	Sangat Baik
7	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	4,31	Memuaskan
8	Perpustakaan Nasional RI	4,12	Sangat Baik
9	Badan Standardisasi Nasional	3,81	Sangat Baik
10	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3,91	Sangat Baik
11	Badan Pengawas Obat dan Makanan	4,53	Memuaskan
12	Lembaga Ketahanan Nasional RI	3,16	Baik
13	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3,98	Sangat Baik
14	Badan Narkotika Nasional	3,38	Baik
15	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	3,14	Baik
16	Badan Keamanan Laut	3,57	Sangat Baik
17	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	3,63	Sangat Baik
18	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3,95	Sangat Baik
19	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	3,09	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
20	Badan Pangan Nasional	3,91	Sangat Baik
21	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	3,38	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Alat Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Intelijen Negara	4,20	Memuaskan
2	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	3,47	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Kabinet

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Kabinet	2,90	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kejaksaan Agung	4,13	Sangat Baik
2	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	3,00	Baik
3	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	4,23	Memuaskan
4	Sekretariat Mahkamah Agung RI	3,52	Sangat Baik
5	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	3,81	Sangat Baik
6	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	3,91	Sangat Baik
7	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	2,65	Baik
8	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	2,99	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Instansi Lainnya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Riset Inovasi Nasional	4,19	Sangat Baik
2	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,07	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Penyiaran Publik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Televisi Republik Indonesia	3,21	Baik
2	Radio Republik Indonesia	3,37	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	3,37	Baik
2	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	3,53	Sangat Baik
3	Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3,32	Baik
4	Komisi Pemberantasan Korupsi	4,36	Memuaskan
5	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	4,66	Memuaskan
6	Sekretariat Jenderal Ombudsman	3,93	Sangat Baik
7	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	3,75	Sangat Baik
8	Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2,82	Baik
9	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3,47	Baik
10	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	2,65	Baik
11	Sekretariat Komisi Kejaksaan	1,67	Kurang
12	Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional	2,22	Cukup
13	Dewan Pertimbangan Presiden	2,63	Baik
14	Sekretariat Dewan Pers	2,58	Cukup
15	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	3,39	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
16	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi	3,57	Sangat Baik
17	Badan Pengusahaan Sabang	2,42	Cukup
18	Badan Pengusahaan Batam	3,82	Sangat Baik
19	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	3,54	Sangat Baik
20	Lembaga Sensor Film	2,75	Baik
21	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	2,36	Cukup
22	Kantor Staf Presiden	3,93	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Aceh	3,64	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	2,39	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pidie	2,25	Cukup
4	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1,44	Kurang
5	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,38	Cukup
6	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	2,75	Baik
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,69	Baik
8	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	2,48	Cukup
9	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	2,29	Cukup
10	Pemerintah Kab. Bireuen	2,32	Cukup
11	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	2,28	Cukup
12	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	2,86	Baik
13	Pemerintah Kab. Gayo Lues	2,69	Baik
14	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,86	Baik
15	Pemerintah Kab. Nagan Raya	2,94	Baik
16	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2,67	Baik
17	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,66	Baik
18	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	2,61	Baik
19	Pemerintah Kota Sabang	3,02	Baik
20	Pemerintah Kota Banda Aceh	3,70	Sangat Baik
21	Pemerintah Kota Langsa	1,95	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
22	Pemerintah Kota Lhokseumawe	2,80	Baik
23	Pemerintah Kota Subulussalam	2,48	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,86	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	3,57	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Karo	3,04	Baik
4	Pemerintah Kab. Langkat	3,66	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	2,38	Cukup
6	Pemerintah Kab. Simalungun	2,37	Cukup
7	Pemerintah Kab. Dairi	2,69	Baik
8	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,85	Baik
9	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	3,14	Baik
10	Pemerintah Kab. Asahan	2,86	Baik
11	Pemerintah Kab. Nias	3,72	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Toba	2,95	Baik
13	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,89	Baik
14	Pemerintah Kab. Nias Selatan	2,90	Baik
15	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	2,80	Baik
16	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,66	Baik
17	Pemerintah Kab. Samosir	2,70	Baik
18	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	2,65	Baik
19	Pemerintah Kab. Padang Lawas	2,17	Cukup
20	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	2,26	Cukup
21	Pemerintah Kab. Batubara	2,67	Baik
22	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	1,93	Cukup
23	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	2,78	Baik
24	Pemerintah Kab. Nias Barat	1,80	Kurang
25	Pemerintah Kab. Nias Utara	2,41	Cukup
26	Pemerintah Kota Medan	3,67	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3,79	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
28	Pemerintah Kota Binjai	3,12	Baik
29	Pemerintah Kota Pematang Siantar	3,06	Baik
30	Pemerintah Kota Tanjung Balai	3,24	Baik
31	Pemerintah Kota Sibolga	2,41	Cukup
32	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	2,66	Baik
33	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2,33	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Riau	3,75	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kampar	2,96	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkalis	2,79	Baik
4	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2,89	Baik
5	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2,54	Cukup
6	Pemerintah Kab. Pelalawan	2,50	Cukup
7	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	3,46	Baik
8	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	3,51	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Siak	3,54	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	3,23	Baik
11	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	3,08	Baik
12	Pemerintah Kota Pekanbaru	3,85	Sangat Baik
13	Pemerintah Kota Dumai	3,90	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	3,05	Baik
2	Pemerintah Kab. Bintan	3,25	Baik
3	Pemerintah Kab. Karimun	2,33	Cukup
4	Pemerintah Kab. Natuna	3,61	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Lingga	2,60	Baik
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	3,04	Baik
7	Pemerintah Kota Batam	3,77	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Tanjungpinang	3,25	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,85	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Agam	2,56	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pasaman	2,67	Baik
4	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	2,70	Baik
5	Pemerintah Kab. Solok	3,49	Baik
6	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	3,51	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	4,23	Memuaskan
8	Pemerintah Kab. Tanah Datar	2,81	Baik
9	Pemerintah Kab. Sijunjung	3,00	Baik
10	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2,46	Cukup
11	Pemerintah Kab. Solok Selatan	3,28	Baik
12	Pemerintah Kab. Dharmasraya	3,61	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	3,66	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,49	Cukup
15	Pemerintah Kota Padang Panjang	3,16	Baik
16	Pemerintah Kota Sawahlunto	3,41	Baik
17	Pemerintah Kota Solok	3,75	Sangat Baik
18	Pemerintah Kota Padang	3,96	Sangat Baik
19	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,75	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Pariaman	3,44	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jambi	3,05	Baik
2	Pemerintah Kab. Batang Hari	3,55	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	2,92	Baik
4	Pemerintah Kab. Bungo	2,71	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
5	Pemerintah Kab. Merangin	3,20	Baik
6	Pemerintah Kab. Kerinci	2,18	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sarolangun	3,10	Baik
8	Pemerintah Kab. Tebo	2,62	Baik
9	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	2,62	Baik
10	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	2,83	Baik
11	Pemerintah Kota Jambi	4,32	Memuaskan
12	Pemerintah Kota Sungai Penuh	3,14	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3,00	Baik
2	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	3,62	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2,62	Baik
4	Pemerintah Kab. Muara Enim	3,29	Baik
5	Pemerintah Kab. Lahat	2,33	Cukup
6	Pemerintah Kab. Musi Rawas	3,09	Baik
7	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	3,55	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Banyuasin	2,71	Baik
9	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,61	Baik
10	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	2,40	Cukup
11	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	2,94	Baik
12	Pemerintah Kab. Empat Lawang	2,34	Cukup
13	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	2,38	Cukup
14	Pemerintah Kota Palembang	3,51	Sangat Baik
15	Pemerintah Kota Pagar Alam	2,54	Cukup
16	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	2,64	Baik
17	Pemerintah Kota Prabumulih	3,37	Baik
18	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2,66	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4,11	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bangka	2,80	Baik
3	Pemerintah Kab. Belitung	3,35	Baik
4	Pemerintah Kab. Bangka Barat	3,16	Baik
5	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	4,07	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	3,25	Baik
7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	4,16	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	3,81	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bengkulu	3,92	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	3,28	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	2,87	Baik
4	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	3,24	Baik
5	Pemerintah Kab. Kaur	2,42	Cukup
6	Pemerintah Kab. Seluma	2,26	Cukup
7	Pemerintah Kab. Mukomuko	2,07	Cukup
8	Pemerintah Kab. Kepahiang	2,47	Cukup
9	Pemerintah Kab. Lebong	3,38	Baik
10	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	2,84	Baik
11	Pemerintah Kota Bengkulu	2,63	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Lampung	4,09	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	3,08	Baik
3	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	2,68	Baik
4	Pemerintah Kab. Lampung Utara	3,12	Baik
5	Pemerintah Kab. Lampung Barat	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2,85	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Tanggamus	3,44	Baik
8	Pemerintah Kab. Way Kanan	3,52	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Lampung Timur	2,84	Baik
10	Pemerintah Kab. Pesawaran	3,49	Baik
11	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	2,49	Cukup
12	Pemerintah Kab. Pringsewu	3,05	Baik
13	Pemerintah Kab. Mesuji	3,99	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	2,94	Baik
15	Pemerintah Kota Metro	3,34	Baik
16	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2,98	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi DK Jakarta	4,46	Memuaskan

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,73	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bogor	4,10	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	3,95	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Cianjur	3,75	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Bekasi	4,08	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Karawang	4,40	Memuaskan
7	Pemerintah Kab. Purwakarta	3,94	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Subang	3,38	Baik
9	Pemerintah Kab. Bandung	3,98	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab. Sumedang	4,51	Memuaskan
11	Pemerintah Kab. Garut	3,89	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	3,76	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Ciamis	3,65	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Cirebon	3,61	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Kuningan	3,57	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
16	Pemerintah Kab. Indramayu	3,93	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Majalengka	2,94	Baik
18	Pemerintah Kab. Bandung Barat	3,78	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Pangandaran	3,56	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Bandung	4,59	Memuaskan
21	Pemerintah Kota Bogor	4,08	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Sukabumi	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kota Cirebon	4,13	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Bekasi	3,83	Sangat Baik
25	Pemerintah Kota Depok	4,32	Memuaskan
26	Pemerintah Kota Cimahi	4,15	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tasikmalaya	3,96	Sangat Baik
28	Pemerintah Kota Banjar	3,58	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Banten	3,47	Baik
2	Pemerintah Kab. Serang	3,73	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Pandeglang	3,45	Baik
4	Pemerintah Kab. Lebak	3,52	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Tangerang	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Tangerang	3,85	Sangat Baik
7	Pemerintah Kota Cilegon	2,56	Cukup
8	Pemerintah Kota Serang	2,61	Baik
9	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	3,48	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,53	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	4,18	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,30	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,91	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,50	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,42	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Semarang	3,31	Baik
3	Pemerintah Kab. Kendal	3,66	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Demak	3,93	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Grobogan	3,57	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Pekalongan	3,05	Baik
7	Pemerintah Kab. Batang	3,55	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tegal	3,16	Baik
9	Pemerintah Kab. Brebes	2,84	Baik
10	Pemerintah Kab. Pati	3,75	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Pemasang	3,04	Baik
13	Pemerintah Kab. Jepara	3,51	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Rembang	3,99	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Blora	3,28	Baik
16	Pemerintah Kab. Banyumas	4,09	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Cilacap	3,27	Baik
18	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,93	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,72	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Magelang	3,92	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Temanggung	3,64	Sangat Baik
22	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Purworejo	3,49	Baik
24	Pemerintah Kab. Kebumen	4,07	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Klaten	4,07	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Boyolali	3,89	Sngat Baik
27	Pemerintah Kab. Sragen	4,34	Memuaskan
28	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,45	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,90	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
30	Pemerintah Kab. Wonogiri	4,20	Memuaskan
31	Pemerintah Kota Semarang	3,95	Sangat Baik
32	Pemerintah Kota Salatiga	3,64	Sangat Baik
33	Pemerintah Kota Pekalongan	3,76	Sangat Baik
34	Pemerintah Kota Tegal	3,95	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Magelang	3,69	Sangat Baik
36	Pemerintah Kota Surakarta	4,30	Memuaskan

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	4,43	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Gresik	4,32	Memuaskan
3	Pemerintah Kab. Mojokerto	4,16	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Sidoarjo	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Jombang	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Sampang	3,67	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Pamekasan	3,92	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Sumenep	3,73	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Bangkalan	2,92	Baik
10	Pemerintah Kab. Bondowoso	3,86	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Situbondo	4,21	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Banyuwangi	4,77	Memuaskan
13	Pemerintah Kab. Jember	3,54	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Malang	3,74	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Pasuruan	3,88	Sangat Baik
16	Pemerintah Kab. Probolinggo	3,97	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Lumajang	3,39	Baik
18	Pemerintah Kab. Kediri	4,63	Memuaskan
19	Pemerintah Kab. Tulungagung	3,78	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Nganjuk	3,84	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Trenggalek	4,22	Memuaskan
22	Pemerintah Kab. Blitar	3,77	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Ngawi	3,61	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
24	Pemerintah Kab. Magetan	2,92	Baik
25	Pemerintah Kab. Ponorogo	3,07	Baik
26	Pemerintah Kab. Pacitan	3,50	Baik
27	Pemerintah Kab. Bojonegoro	4,14	Sangat Baik
28	Pemerintah Kab. Tuban	4,24	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Lamongan	4,18	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Madiun	4,31	Memuaskan
31	Pemerintah Kota Surabaya	4,54	Memuaskan
32	Pemerintah Kota Mojokerto	4,32	Memuaskan
33	Pemerintah Kota Malang	4,24	Memuaskan
34	Pemerintah Kota Pasuruan	4,07	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Probolinggo	4,04	Sangat Baik
36	Pemerintah Kota Blitar	4,11	Sangat Baik
37	Pemerintah Kota Kediri	3,89	Sangat Baik
38	Pemerintah Kota Madiun	4,57	Memuaskan
39	Pemerintah Kota Batu	3,57	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3,58	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Sambas	2,91	Baik
3	Pemerintah Kab. Sanggau	3,29	Baik
4	Pemerintah Kab. Sintang	2,30	Cukup
5	Pemerintah Kab. Mempawah	2,73	Baik
6	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	2,82	Baik
7	Pemerintah Kab. Ketapang	3,06	Baik
8	Pemerintah Kab. Bengkayang	3,12	Baik
9	Pemerintah Kab. Landak	2,40	Cukup
10	Pemerintah Kab. Melawi	2,47	Cukup
11	Pemerintah Kab. Sekadau	3,13	Baik
12	Pemerintah Kab. Kubu Raya	3,38	Baik
13	Pemerintah Kab. Kayong Utara	2,68	Baik
14	Pemerintah Kota Pontianak	3,49	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
15	Pemerintah Kota Singkawang	3,35	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2,87	Baik
2	Pemerintah Kab. Kapuas	2,63	Baik
3	Pemerintah Kab. Barito Utara	2,73	Baik
4	Pemerintah Kab. Barito Selatan	3,20	Baik
5	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	3,22	Baik
6	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	2,87	Baik
7	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	3,16	Baik
8	Pemerintah Kab. Gunung Mas	2,74	Baik
9	Pemerintah Kab. Lamandau	3,15	Baik
10	Pemerintah Kab. Sukamara	2,75	Baik
11	Pemerintah Kab. Murung Raya	2,63	Baik
12	Pemerintah Kab. Katingan	3,25	Baik
13	Pemerintah Kab. Seruyan	2,50	Cukup
14	Pemerintah Kab. Barito Timur	2,82	Baik
15	Pemerintah Kota Palangka Raya	3,75	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	3,63	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Banjar	2,87	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,12	Baik
4	Pemerintah Kab. Tapin	3,81	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	4,09	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	3,37	Baik
7	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,99	Baik
8	Pemerintah Kab. Tabalong	3,70	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,43	Cukup
10	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	2,51	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
11	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,30	Baik
12	Pemerintah Kab. Balangan	3,34	Baik
13	Pemerintah Kota Banjarmasin	4,06	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,74	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	3,79	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	3,09	Baik
3	Pemerintah Kab. Paser	3,27	Baik
4	Pemerintah Kab. Berau	2,28	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kutai Barat	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Kutai Timur	3,02	Baik
7	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,87	Baik
8	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	2,25	Cukup
9	Pemerintah Kota Samarinda	3,85	Sangat Baik
10	Pemerintah Kota Balikpapan	3,96	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Bontang	3,39	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	3,79	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bulungan	3,93	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Malinau	2,45	Cukup
4	Pemerintah Kab. Nunukan	2,89	Baik
5	Pemerintah Kab. Tana Tidung	2,84	Baik
6	Pemerintah Kota Tarakan	3,11	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	3,01	Baik
2	Pemerintah Kab. Minahasa	2,23	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	2,73	Baik
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	2,46	Cukup
5	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	2,48	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	2,39	Cukup
7	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	3,37	Baik
8	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,34	Cukup
9	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	2,46	Cukup
10	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	3,02	Baik
11	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2,66	Baik
12	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,88	Baik
13	Pemerintah Kota Manado	3,93	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Bitung	3,31	Baik
15	Pemerintah Kota Tomohon	3,03	Baik
16	Pemerintah Kota KotaMobagu	2,93	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Gorontalo	4,13	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Gorontalo	2,68	Baik
3	Pemerintah Kab. Boalemo	2,40	Cukup
4	Pemerintah Kab. Pohuwato	2,52	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bone Bolango	3,00	Baik
6	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	2,89	Baik
7	Pemerintah Kota Gorontalo	2,82	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2,91	Baik
2	Pemerintah Kab. Poso	2,52	Cukup
3	Pemerintah Kab. Donggala	2,45	Cukup
4	Pemerintah Kab. Tolitoli	2,49	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
5	Pemerintah Kab. Banggai	3,59	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Buol	3,19	Baik
7	Pemerintah Kab. Morowali	3,25	Baik
8	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	2,55	Cukup
9	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	2,72	Baik
10	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	3,06	Baik
11	Pemerintah Kab. Sigi	2,29	Cukup
12	Pemerintah Kab. Banggai Laut	2,11	Cukup
13	Pemerintah Kab. Morowali Utara	2,56	Cukup
14	Pemerintah Kota Palu	2,58	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	3,94	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Pinrang	3,49	Baik
3	Pemerintah Kab. Gowa	3,63	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Wajo	2,77	Baik
5	Pemerintah Kab. Bone	3,18	Baik
6	Pemerintah Kab. Tana Toraja	2,75	Baik
7	Pemerintah Kab. Maros	3,15	Baik
8	Pemerintah Kab. Luwu	2,60	Baik
9	Pemerintah Kab. Sinjai	3,01	Baik
10	Pemerintah Kab. Bulukumba	2,56	Cukup
11	Pemerintah Kab. Bantaeng	3,64	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Jeneponto	3,10	Baik
13	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	2,57	Cukup
14	Pemerintah Kab. Takalar	2,80	Baik
15	Pemerintah Kab. Barru	2,79	Baik
16	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	3,04	Baik
17	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,64	Baik
18	Pemerintah Kab. Soppeng	2,98	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
19	Pemerintah Kab. Enrekang	3,20	Baik
20	Pemerintah Kab. Luwu Utara	3,26	Baik
21	Pemerintah Kab. Luwu Timur	3,16	Baik
22	Pemerintah Kab. Toraja Utara	2,31	Cukup
23	Pemerintah Kota Makassar	4,02	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Parepare	2,62	Baik
25	Pemerintah Kota Palopo	3,12	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2,87	Baik
2	Pemerintah Kab. Konawe	2,92	Baik
3	Pemerintah Kab. Buton	2,26	Cukup
4	Pemerintah Kab. Muna	2,35	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kolaka	3,68	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	3,68	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	2,63	Baik
8	Pemerintah Kab. Bombana	2,85	Baik
9	Pemerintah Kab. Wakatobi	2,55	Cukup
10	Pemerintah Kab. Buton Utara	2,19	Cukup
11	Pemerintah Kab. Konawe Utara	2,85	Baik
12	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	2,12	Cukup
13	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	2,16	Cukup
14	Pemerintah Kab. Buton Selatan	2,25	Cukup
15	Pemerintah Kab. Buton Tengah	2,63	Baik
16	Pemerintah Kab. Muna Barat	1,82	Cukup
17	Pemerintah Kota Kendari	3,23	Baik
18	Pemerintah Kota Baubau	3,09	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	3,70	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Pasangkayu	2,52	Cukup
3	Pemerintah Kab. Mamuju	2,42	Cukup
4	Pemerintah Kab. Mamasa	2,01	Cukup
5	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	3,88	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Majene	3,04	Baik
7	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	2,28	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bali

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bali	4,30	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Buleleng	3,69	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Jembrana	3,77	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Gianyar	3,49	Baik
5	Pemerintah Kab. Karangasem	2,57	Cukup
6	Pemerintah Kab. Bangli	2,71	Baik
7	Pemerintah Kab. Badung	3,87	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tabanan	3,54	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Klungkung	3,14	Baik
10	Pemerintah Kota Denpasar	3,96	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,56	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lombok Barat	3,05	Baik
3	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	3,04	Baik
4	Pemerintah Kab. Lombok Timur	3,27	Baik
5	Pemerintah Kab. Bima	2,52	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sumbawa	2,90	Baik
7	Pemerintah Kab. Dompu	2,52	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
8	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	3,45	Baik
9	Pemerintah Kab. Lombok Utara	2,71	Baik
10	Pemerintah Kota Mataram	3,55	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Bima	2,66	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,89	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kupang	2,48	Cukup
3	Pemerintah Kab. Belu	2,47	Cukup
4	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	2,43	Cukup
5	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2,83	Baik
6	Pemerintah Kab. Alor	2,19	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sikka	2,02	Cukup
8	Pemerintah Kab. Flores Timur	2,10	Cukup
9	Pemerintah Kab. Ende	2,58	Cukup
10	Pemerintah Kab. Ngada	2,17	Cukup
11	Pemerintah Kab. Manggarai	2,90	Baik
12	Pemerintah Kab. Sumba Timur	2,56	Cukup
13	Pemerintah Kab. Sumba Barat	3,12	Baik
14	Pemerintah Kab. Lembata	2,42	Cukup
15	Pemerintah Kab. Rote Ndao	3,35	Baik
16	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	3,47	Baik
17	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	2,64	Baik
18	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	2,03	Cukup
19	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	2,19	Cukup
20	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	1,84	Cukup
21	Pemerintah Kab. Malaka	2,17	Cukup
22	Pemerintah Kota Kupang	3,14	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku	2,63	Baik
2	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	2,24	Cukup
3	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	1,96	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	2,31	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	2,41	Cukup
6	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	1,90	Cukup
7	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	2,41	Cukup
8	Pemerintah Kab. Buru Selatan	1,81	Cukup
9	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	2,05	Cukup
10	Pemerintah Kota Ambon	2,64	Baik
11	Pemerintah Kota Tual	2,28	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2,69	Baik
2	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	1,90	Cukup
3	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	1,90	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	2,06	Cukup
5	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	2,43	Cukup
6	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	2,73	Baik
7	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	1,38	Kurang
8	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	1,97	Cukup
9	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	2,09	Cukup
10	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	2,32	Cukup
11	Pemerintah Kota Ternate	1,89	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua	2,03	Cukup
2	Pemerintah Kab. Jayapura	2,82	Baik

3	Pemerintah Kab. Keerom	1,14	Kurang
4	Pemerintah Kab. Sarmi	1,53	Kurang
5	Pemerintah Kab. Supiori	1,48	Kurang
6	Pemerintah Kota Jayapura	2,35	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2,28	Cukup
2	Pemerintah Kab. Manokwari	1,75	Kurang
3	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	2,40	Cukup
4	Pemerintah Kab. Fak-Fak	1,68	Kurang
5	Pemerintah Kab. Kaimana	2,15	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	1,61	Kurang
2	Pemerintah Kab. Merauke	2,25	Cukup
3	Pemerintah Kab. Boven Digoel	2,16	Cukup
4	Pemerintah Kab. Asmat	1,03	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	1,88	Cukup
2	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	1,94	Cukup
3	Pemerintah Kab. Mimika	2,33	Cukup
4	Pemerintah Kab. Puncak	1,62	Kurang
5	Pemerintah Kab. Dogiyai	1,53	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Pegunungan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	1,62	Kurang
2	Pemerintah Kab. Jayawijaya	2,43	Cukup
3	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	1,09	Kurang
4	Pemerintah Kab. Nduga	1,50	Kurang
5	Pemerintah Kab. Tolikara	1,47	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat Daya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	2,39	Cukup
2	Pemerintah Kab. Sorong	2,49	Cukup
3	Pemerintah Kab. Raja Ampat	1,33	Kurang
4	Pemerintah Kota Sorong	1,78	Kurang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RINI WIDYANTINI



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317, Website : www.inspektorat@jambiprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023

NOMOR : LAP-700/145 /ITPROV-4/VI/2024
TANGGAL : 13 JUNI 2024
HAL : HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023
TAHUN : 2024

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- 6) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 118 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi; dan
- 7) Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor B-700_150/ST/ITPROV-2/IV/2024 Tanggal 29 April 2024 tentang melaksanakan Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III Tahun 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengihtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem manajemen yang menerapkan siklus *Planning, Do, Check* dan *Act* (PDCA) dimana pada masing-masing proses dibutuhkan suatu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana suatu instansi pemerintah

WPJ	PT	KT

melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya dalam bentuk umpan balik yang dilaksanakan secara terus menerus.

Evaluasi bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan Rencana Strategi (RENSTRA) masing-masing Perangkat Daerah.

Penerapan SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2022 memperoleh Kategori "B" yang diinterpretasikan sebagai Perangkat Daerah yang dalam penerapan SAKIP telah Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian perencanaan kinerja atas ketersediaan dokumen, dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- 4) Penilaian akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai dan berdampak dalam peningkatan implementasi SAKIP secara efektivitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) serta kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, yaitu:

- 1) *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi
Teknis Pengumpulan Data dan Informasi berupa menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
- 2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
Teknis Tanya Jawab Sederhana merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Komunikasi dilakukan dengan wawancara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon dan *chat*.

WPJ	PT	KT
		

3) Observasi

Teknis observasi dilakukan dengan cara pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan Organisasi KOMINFO sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Layanan *E-Government*, membawahi:
 - a) Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - b) Seksi Pengembangan *E-Government*; dan
 - c) Seksi Tata Kelola *Government*.
4. Bidang Informasi Publik dan Statistik, membawahi:
 - a) Seksi Layanan Informasi Publik;
 - b) Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik.
5. Bidang Komunikasi Publik, membawahi:
 - a) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - b) Seksi Sumber Daya dan Komunikasi Publik; dan
 - c) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
6. Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi, membawahi
 - a) Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian;
 - b) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian; dan
 - c) Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Penetapan kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis 2021-2026 yang sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jambi Tahun 2023

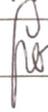
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi		Sumber Data	Target
1	2	3	4		5	6
1	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi public	Peringkat keterbukaan informasi	Kualifikasi Peringkat	Nilai Indeks	Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022	Informatif/ 91
			Infomatif	90-100		
			Menuju Informatif	80-89,9		
			Cukup Informatif	60-79,9		
			Kurang Informatif	40-59,9		
			Tidak Informatif	< 39		

WPJ	PT	KT

		Jumlah Kerjasama	Kegiatan Monev Opini dan Aspirasi Publik	Media Online	209
2	Meningkatnya Infrastruktur TIK	Jumlah Desa Yang difasilitasi oleh Akses Internet	Jumlah sebaran lokasi penyediaan internet di 9 Kab, 48 Kecamatan, dan 80 desa termasuk didalamnya 285 Desa Black SPOT	Desa Black SPOT	80
3	Meningkatnya Penggunaan Teknologi Informatika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks SPBE	Indeks SPBE diperoleh dari Hasil Evaluasi SPBE terhadap K/L/Pemda (tingkat kematangan penerapan SPBE).	PermenPANRB No.59 Tahun 2020	2.8
4	Meningkatnya layanan persandian	Indeks Keamanan Informasi	Menggunakan Penilaian Indeks KAMI	Verifikasi Badan Riset dan Sandi Negara RI	Level 1
5	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase Data Statistik Sektoral OPD terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi	Seluruh Perangkat Daerah untuk Pemenuhan Data Statistik Sektoral	EPSS	70%
6	Meningkatnya kualitas pelayanan Kantor dan Akuntabilitas	IKM	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Adapun kategori penilaian SAKIP adalah AA dengan nilai > 90-100, A dengan nilai > 80-90, BB dengan nilai > 70-80, B dengan nilai > 60-70, CC dengan nilai >50-60, C dengan nilai >30-50 dan D dengan nilai > 0-30	e-SAKIP	89
		Nilai SAKIP	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Survei IKM/ Ombudsman	75

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi public	Peningkatan Keterbukaan Informasi Perangkat Daerah	Informatif
		Jumlah kerjasama dengan media	209 media
2	Meningkatnya infrastruktur TIK, termasuk fasilitasi pengadaan akses internet di desa untuk mewujudkan jambi bebas blank spot	Jumlah Desa yang difasilitasi akses internet	80 Desa
3	Meningkatnya Penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintahan Provinsi Jambi	2.8
4	Meningkatnya layanan persandian	Indeks Keamanan Informasi	Level 1
5	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase OPD yang data statistic sectoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi	70%
6	Meningkatnya kualitas pelayanan Kantor dan akuntabilitas kinerja	IKM	89
		Nilai SAKIP	75

WPJ	PT	KT
		

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023 tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp40.614.619.349,00 yang digunakan untuk melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan, dan 42 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	243.972.681,00
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	16.927.972.640,00
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	90.907.515,00
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	380.202.152,00
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	595.160.209,00
JUMLAH		40.614.619.349,00

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Penilaian Implementasi SAKIP Unit Kerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistim yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinejra untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023 memperoleh nilai **70,15** kategori "**BB**" dengan interpretasi "**Sangat Baik**" dengan catatan. Rincian hasil penilalaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

WPJ	PT	KT
		

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30%	5,40	6,30	10,50	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30%	4,20	6,30	10,50	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	2,10	3,60	3,75	9,45
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	3,50	5,25	8,75	17,50
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100	15,20	21,45	33,50	70,15

H. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

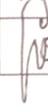
No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Rencana Kerja Tahunan telah dibuat dan agar sesuai dengan sistematika yang telah diatur dalam pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.	Selesai ditindaklanjuti
2	Diagram cascading telah dibuat serta harus selaras dengan diagram cascading antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan.	

. II. Gambaran Hasil Evaluasi

A. Perencanaan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja

- 1) Terdapat Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2023 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- 2) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/Kep.Gub/Setda.Org-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 16 Agustus 2022;
- 3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025;
- 4) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 5) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek/tahunan yaitu Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2023 dan Perubahannya;
- 6) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yaitu Rencana Aksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2023; dan
- 7) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yaitu DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dan perubahannya.

WPJ	PT	KT
		

b. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan/ditetapkan yaitu: Renstra beserta perubahannya, Renja beserta perubahannya, Rencana Aksi, dan DPA beserta perubahannya;
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan, namun belum tepat waktu yaitu bukti upload tanggal 29 Maret 2024 pada aplikasi esr.menpan.go.id diantaranya: PK eselon II, LKJIP Tahun 2023, Rencana Aksi 2023, Cascading, Pohon Kinerja, Renja 2023, IKU 2021-2026, Renstra 2021-2026;
- 3) Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai yaitu perjanjian kinerja Pimpinan Perangkat Daerah (Eselon II) sudah diturunkan pada unit kerja s/d Eselon IV melalui diagram pohon kinerja tetapi pohon kinerja belum diformalkan;
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai yaitu tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra sudah sesuai dengan visi dan misi Perangkat Daerah, sebagaimana berikut:

Tujuan	Meningkatkan Keterbukaan informasi kepada Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan berbasis elektronik
Sasaran	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik
	Meningkatnya Penggunaan teknologi infomartika dalam penyelenggaraan pemerintahan

- 5) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART yaitu target kinerja pada dokumen perencanaan Renstra dan Renja sudah masuk dalam kriteria SMART (*specific/jelas tujuannya, measurable/memiliki indikator yang dapat diukur, achievable/bisa tercapai, relevan/sesuai dengan visi/misi/tujuan Perangkat Daerah, time bond/terdapat target waktu yang jelas*), sebagaimana berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi public	Peringkat keterbukaan informasi	Menuju Informatif (81)	Menuju Informatif (86)	Informatif (91)	Informatif (93)	Informatif (95)
2	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya Penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks SPBE	2,7	3.0	3.2	3.3	3.5

- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*) tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis) yaitu IKU selaras dengan tujuan dan sasaran pada PK.

WPJ	PT	KT
		

- 7) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis yaitu target minimal yang ditetapkan pada Renja sesuai dengan Renstra;
- 8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*) yaitu diagram *Cascading* telah menunjukkan kesinambungan antara tujuan dengan sasaran dan antara organisasi dengan unit kerja, namun belum diformalkan;
- 9) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
- 10) Setiap unit kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yaitu pegawai eselon 2 – 3 dan seluruh pegawai fungsional dan struktural telah membuat perencanaan kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK); dan
- 11) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yaitu Pegawai struktural, fungsional, dan staff menetapkan SKP atau PK yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagai komitmen dalam pencapaian target kinerja.

c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai yaitu pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2023 jumlah anggaran sebesar Rp40.614.619.349,00 dengan jumlah 5 program, 12 kegiatan, 42 sub kegiatan;
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai yaitu Rencana Aksi telah memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung kinerja;
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau masih *on the right track* yaitu target triwulan dalam Rencana Aksi sesuai dengan target setiap triwulan yang telah ditetapkan pada Renja;
- 4) Rencana aksi telah memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung kinerja tetapi format belum sepenuhnya mengacu pada Pergub Nomor 729/Kep.Gub/Setda.Org-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi;
- 5) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya yaitu langkah perbaikan kinerja tertuang di Renja;
- 6) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yaitu Renja memuat target kinerja yang lebih baik;
- 7) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yaitu Eselon 2, dan 3 telah membuat PK sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran; dan
- 8) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yaitu Setiap pegawai membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran.

WPJ	PT	KT
		

B. Pengukuran Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

- 1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yaitu SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Nomor : 236/1-3/Diskominfo/2022 Tanggal : 2 Maret 2022 tentang SOP Pengumpulan Data Kinerja;
- 2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yaitu IKU, Renstra, Renja, PK, dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/Kep.Gub/Setda.Org-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi;

b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja

- 1) Pimpinan harus selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja yaitu terdapat lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah;
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan yaitu terdapat sumber data pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKJIP Unit Kerja;
- 3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan yaitu ada data capaian kinerja realisasi fisik dan keuangan serta formulasi perhitungan capaian kinerja sesuai dengan IKU;
- 4) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan sudah terdapat jadwal, notulensi dan dokumentasi pengukuran kinerja triwulan;
- 5) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang yaitu terdapat laporan monev triwulan 1,2,3, dan 4 disertai dengan daftar hadir dan diketahui oleh pimpinan Perangkat Daerah;
- 6) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu aplikasi <http://simantap.jambiprov.go.id> aplikasi SKP Online (<http://skp.jambiprov.go.id>, SIPD Kemendagri <https://sipd.kemendagri.go.id>, Aplikasi <http://paket.jambiprov.go.id>).
- 7) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 271/KEP.GUB/BKD-5.1/2023 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023;
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional yaitu terdapat Pergub/Kepgub mengenai penempatan/penghapusan jabatan struktural dan fungsional berdasarkan kinerja pegawai Nomor 62/KEP.GUB/BKD-3.3/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja dan Tim Sekretariat Penilai Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023;
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi yaitu dokumen perencanaan kinerja mengalami pergeseran atau perubahan (Renja Perubahan)/ terdapat penyesuaian dalam target;
- 4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja yaitu hasil Monev Triwulan menginformasikan realisasi kinerja, faktor hambatan dan solusi serta rekomendasi perbaikan;
- 5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja yaitu Kepala Perangkat Daerah membuat penyesuaian kebijakan dengan terbitnya Renja Perubahan yang telah diformalkan;

WPJ	PT	KT
		

- 6) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja yaitu terdapat perubahan rencana kinerja yang telah ditetapkan;
- 7) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja yaitu terdapat perubahan atau penyesuaian anggaran berdasarkan Renja Perubahan dan hasil pengukuran kinerja pada Monev Renja Triwulan;
- 8) Sudah terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yaitu LKjIP sudah menginformasikan efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan;
- 9) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yaitu Monev Renja Triwulan memberikan informasi faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan; dan
- 10) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yaitu SKP bulanan setiap pegawai memberikan laporan pengukuran kinerja bulanan yang memberikan informasi mengenai target dan realisasi capaian kinerja setiap bulan.

C. Pelaporan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 telah disusun;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan yaitu LKjIP telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan disertai stempel Perangkat Daerah;
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan yaitu bukti upload tanggal 29 Maret 2024 pada aplikasi esr.menpan.go.id dan pada aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi; dan
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan dengan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi Cq. Biro Organisasi Nomor: Nomor : S-0065/Diskominfo 1.3/1/2024 Tanggal 19 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Kinerja (LKjIP) TA. 2023.

b. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar yaitu penyusunan LKjIP sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yaitu pada bab III LKjIP telah menyajikan capaian Kinerja;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
- 7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- 8) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; dan

WPJ	PT	KT
		

- 9) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

c. Kualitas Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) yaitu penetapan LKjIP dan Monev selalu dihadiri dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai yaitu LKjIP memberikan informasi target kinerja dan anggaran dengan realisasi kinerja dan anggaran yang tertera pada PK;
- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yaitu LKjIP memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sudah sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 4) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yaitu LKjIP menyajikan informasi keuangan/anggaran (target dan realisasi) masing-masing sasaran/indikator kinerja sesuai PK Pejabat Eselon, Fungsional, dan Struktural;
- 5) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yaitu LKjIP menyajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran;
- 6) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya yaitu terdapat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja berjalan; dan
- 7) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi yaitu sebagian target kinerja tercapai dengan mencapai 100% sebagai wujud berkomitmen dan adanya efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen serta adanya rekomendasi atas kendala/hambatan sebagai wujud kepedulian.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 118 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi;
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara optimal pada unit kerja/Perangkat Daerah dan belum terdapat Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3 dan 4; dan
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang yaitu Proses monev dilakukan secara *bottom up*. Namun belum dilakukan secara optimal.

WPJ	PT	KT
		

b. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar yaitu SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Nomor 650/KOMINFO-1.3/XII/2023 Tanggal 26 Januari 2023 tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dan SOP Nomor 256/DISKOMINFO/2023 tentang SOP Pengumpulan Data Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, dan SOP Penyusunan Laporan Kinerja Nomor Diskominfo : 1.3.7 tentang SOP Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai yaitu dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dengan bukti sertifikat Bimtek tentang Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu Monev Triwulan belum menginformasikan target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi; dan
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja/Perangkat Daerah yaitu Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang di *input* pada monev sesuai dengan PK (JPT Pratama, Adminsitrator, Pengawas/atau yang disetarakan beserta 1 orang pegawai) yang telah disetujui/ditetapkan.

c. Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti yaitu rekomendasi perbaikan atas faktor hambatan pada Monev telah dilaksanakan dan ada peningkatan realisasi target pada Monev Triwulan berikutnya;
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yaitu rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya (2022) telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah;
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

E. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Kimunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	%	Informatif (91)	Cukup Informatif (77,54)	85.20%	
		Jumlah Kerjasama dengan Media	%	209	291	139%	
2	Meningkatnya Infrastruktur TIK, termasuk fasilitasi pengadaan akses internet di desa untuk	Jumlah Desa yang difasilitasi akses internet	%	80	80	100%	

WPJ	PT	KT
		

	mewujudkan jambi bebas Blank spot						
3	Meningkatnya Penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks SPBE	%	2.8	3.31	118,21%	Baik
4	Meningkatnya layanan persandian	Indeks Keamanan Informasi	%	Level 1	Level 1 s.d level 2/52%	100%	
5	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase Data Statistik Sektoral OPD terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi	%	70%	62.79%	89,7%	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor dan akuntabilitas kinerja	IKM	%	89	79,26	89,05%	
		Nilai SAKIP	%	75	62,11	82,81%	

III. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Agar Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Pelaksana disusun dan diformalkan paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan;
- 2) Agar Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Bappeda Paling Lambat 1 (satu) Minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi;
- 3) Agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;
- 4) Agar mengoptimalkan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja, serta perbaikan dan peningkatan kinerja;
- 5) Agar melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Rencana Aksi dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) triwulan 1,2,3 dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui pimpinan OPD yang disertai dengan jadwal evaluasi dan membuat notulensi rapat mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas;
- 6) Agar Pimpinan selalu terlibat dalam mengukur capaian kinerja sebagai pengambil keputusan;
- 7) Agar Perjanjian Kinerja Eselon II memperhatikan sasaran strategis pada Perangkat Daerah yang berorientasi hasil,sesuai dengan level jabatannya, dan indikator kinerja yang cukup untuk mengukur sasaran kerjanya;
- 8) Agar Perangkat Daerah membuat Peraturan/SK/SOP/ Petunjuk teknis mengenai pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- 9) Agar Diagram Cascading diformalkan;

WPJ	PT	KT
		

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

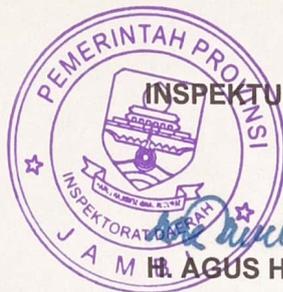
Implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah "70,15" kategori "**Sangat Baik**" dengan Predikat "**BB**".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan komponen/sub komponen dan bobot penilaian AKIP pada Kertas Kerja Evaluasi sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja perkomponen dengan tahun sebelumnya.

B. Saran

Pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan merupakan tanggung jawab pimpinan. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di unit kerja yang dipimpinnya sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dan diharapkan meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas unit kerja sehingga Laporan Kinerja unit kerja lebih baik pada tahun yang akan datang, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



H. AGUS HERIANTO, SH, QGIA, CGCAE, QRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690819 199703 1 004

WPJ	PT	KT



LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2024

Diskominfo Provinsi Jambi | Periode Layanan 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM.....	4
2.1 Pelaksana SKM.....	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	7
1.1 Jumlah Responden SKM	7
1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	8
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	11
4.3 Tren Nilai SKM	13
BAB V.....	15
KESIMPULAN.....	15
LAMPIRAN	16
1. Kuesioner	16
2. Hasil Olah Data SKM	22
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM).....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jambi, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas layanan informasi, layanan sengketa informasi, layanan media, layanan internet, pelayanan SiAbon yang telah diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner berbasis sistem yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya terkumpul dan disimpan oleh sistem SKM berbasis website. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbuan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 2(dua) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juli 2024	23
2.	Pengumpulan Data	Minggu ke 1 & 2, Agustus 2024	10
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Minggu ke 3, Agustus 2024	5

4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Minggu ke 4, Agustus 2024	5
----	--------------------------------	------------------------------	---

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari layanan informasi, layanan sengketa informasi, layanan media, layanan internet, pelayanan SiAbon dan ID Card pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 250 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 152 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 152 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	84	55,3%
		PEREMPUAN	68	44,7%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	2	1,3%
		SLTP/SMP	7	4,6%
		SLTA/SMA	78	51,3%
		DIII	2	1,3%
		D4/SI	50	32,9%
		S2	12	7,9%
		S3	1	0,7%
3	PEKERJAAN	PNS	47	31,3%
		TNI	0	0
		SWASTA	5	3,3%
		WIRUSAHA	4	2,7%
		LAINNYA	96	64%

Layanan yang disediakan oleh Diskominfo Provinsi Jambi meliputi layanan informasi, penyelesaian sengketa informasi, layanan media, layanan internet, layanan SiAbon, serta layanan ID Card.

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

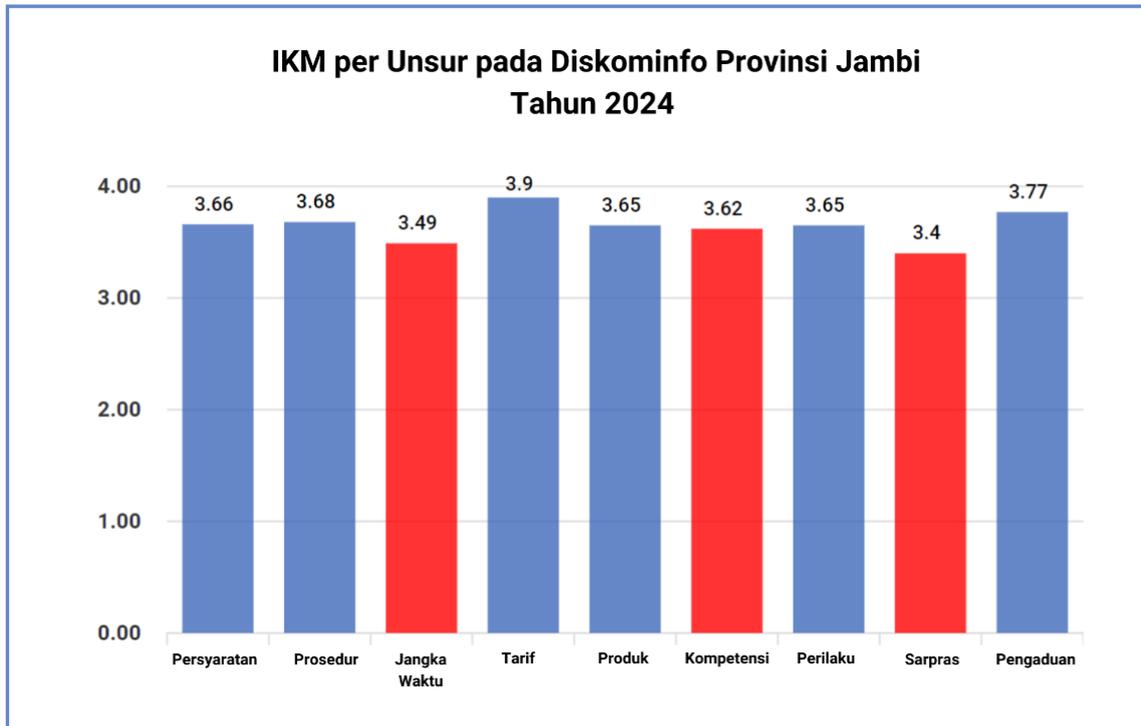
Pengolahan data SKM didapat langsung dari sistem SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.66	3.68	3.49	3.9	3.65	3.62	3.65	3.4	3.77
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Diskominfo Provinsi Jambi	91,12 (A atau Sangat Baik)								

Berdasarkan Tabel 1, seluruh unsur pelayanan memiliki nilai rata-rata yang tinggi, berkisar antara 3.40 hingga 3.90, dengan kategori "A" yang menunjukkan kualitas pelayanan sangat baik. Nilai IKM Diskominfo Provinsi Jambi mencapai 91.12, juga dikategorikan sebagai "Sangat Baik". Meskipun semua unsur mendapatkan kategori "A", terdapat sedikit variasi dalam nilai, dengan unsur U3 dan U8 memiliki nilai yang sedikit lebih rendah namun tetap sangat baik. Secara keseluruhan, pelayanan yang diberikan sangat memuaskan, namun perbaikan dapat difokuskan pada unsur dengan nilai yang lebih rendah untuk memastikan kualitas tetap optimal.

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



Berdasarkan grafik IKM per unsur pada Diskominfo Provinsi Jambi Tahun 2024, nilai rata-rata untuk setiap unsur pelayanan berada dalam rentang 3.40 hingga 3.90. Unsur "Kompetensi", "Jangka Waktu" dan "Sarana Prasarana" mendapatkan nilai lebih rendah, masing-masing 3,62, 3.49 dan 3.40, namun masih masuk dalam kategori "Sangat Baik". Unsur lainnya, seperti "Biaya/Tarif" dan "Pengaduan", memiliki nilai tertinggi, yakni 3.90 dan 3.77.

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Nilai terendah pada penilaian ini diberikan pada aspek Sarana dan Prasarana, dengan skor sebesar 3,4. Waktu Penyelesaian menjadi unsur kedua dengan nilai terendah, yaitu 3,49. Diikuti oleh Kompetensi Pelaksana, yang mendapatkan nilai 3,62 dan termasuk dalam tiga unsur dengan skor terendah.
2. Di sisi lain, tiga unsur layanan yang memperoleh nilai tertinggi adalah Biaya/Tarif, yang mencapai skor. Selanjutnya, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan mencatatkan nilai 3,77, dan Sistem Mekanisme dan Prosedur berada di peringkat ketiga dengan skor 3,68.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Selalu terus dikembangkan dari Segi Sumber Daya Manusia yang Berkompeten dan Fokus dalam Pembagian Pelayanan yang diberikan, sehingga bagi yang ingin diberikan Layanan bisa segera diatasi segera permasalahan yang akan dilaksanakan. Juga tentunya Sarana dan Prasarana diperhatikan untuk bagian layanan, sehingga petugas dan yang diberikan layanan merasa Nyaman dan Aman dalam memberikan Pelayanan dan memadai pastinya.”
- “Ruang Tunggu Tamu tolong lebih ditingkatkan dan di perhatikan lagi kebersihan kantor terutama wc”.
- “Mohon agar proses layanan aplikasi SIABON diperbaiki, terutama dalam hal kecepatan penanganan, agar tidak perlu di-follow up lagi.”.
- “Tambahkan infografis terkait layanan penting di diskominfo di bagian depan biar tidak kebingungan saat petugas piket tidak bisa menjawab”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana menjadi unsur dengan nilai terendah, menunjukkan adanya ketidakpuasan dari pengguna layanan terhadap fasilitas yang tersedia. Aduan yang masuk menyoroti perlunya peningkatan pada kebersihan, terutama di area kantor dan fasilitas seperti WC. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam ruang tunggu serta pelayanan yang diberikan oleh petugas. Kemudian, kurangnya infografis ataupun pemberitahuan terkait dengan alur pelayanan yang ada pada Diskominfo.
- Waktu penyelesaian mendapatkan nilai terendah kedua, yang mengindikasikan adanya keluhan terhadap lamanya proses penyelesaian layanan. Aduan terkait menyoroti lambatnya penanganan pada aplikasi SiAbon, yang memerlukan perbaikan terutama dalam hal kecepatan layanan agar tidak perlu dilakukan tindak lanjut oleh pengguna. Permasalahan ini memperlihatkan perlunya perbaikan dalam efisiensi dan kecepatan layanan yang diberikan, sehingga pengguna tidak mengalami keterlambatan yang berlarut-larut.
- Kompetensi pelaksana menjadi unsur dengan nilai ketiga terendah, yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan dan fokus dalam pelayanan. Masukan yang diterima menekankan kurangnya pengetahuan pegawai mengenai alur pelayanan di Diskominfo. Akibatnya, saat pegawai bertugas piket dan melayani tamu, mereka sering tidak tahu atau tidak bisa menjelaskan alur pelayanan yang diminta oleh tamu. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan pelatihan dan pengembangan bagi petugas, agar mampu memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan pengguna.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui analisis terkait umpan balik atau masukan yang diberikan oleh responden. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut

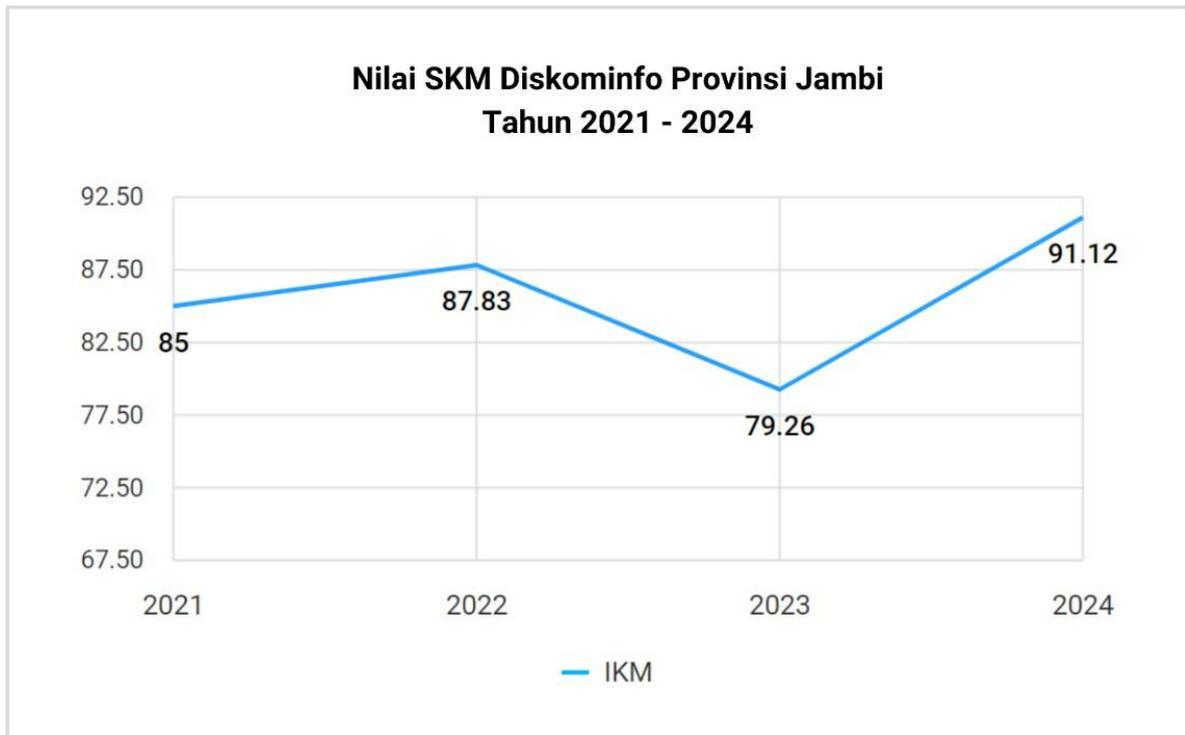
No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Sarana dan Prasarana	Menyediakan infografis alur pelayanan di layar monitor ruang tunggu tamu	√				Sub bagian Umum dan Kepegawaian
		Menyediakan tabel checklist kebersihan untuk pengguna toilet	√				
		Mengalokasikan anggaran rutin untuk alat-alat kebersihan, cairan pembersih toilet, sabun, dan pengharum ruangan	√		√		
		Mengalokasikan anggaran untuk pengharum ruangan dan hand sanitizer di ruang tunggu	√		√		
2.	Waktu Penyelesaian	Mengunggah perkembangan layanan terbaru di situs web Diskominfo agar penerima layanan dapat memeriksa status layanan	√	√	√	√	Sub bagian E-Government
		Mewajibkan penerima layanan mencantumkan	√	√	√	√	

		kontak WhatsApp atau email untuk komunikasi terkait status layanan					
3.	Kompetensi Pelaksana	Mengirimkan pegawai Diskominfo untuk mengikuti pelatihan pelayanan publik	√				Sub bagian Umum dan Kepegawaian
		Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai mengenai alur pelayanan Diskominfo, dengan fokus pada peningkatan kecepatan penanganan layanan dalam aplikasi SiAbon	√				

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 2. Grafik Nilai SKM Diskominfo Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2024



Berdasarkan grafik "Nilai SKM Diskominfo Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2024" menunjukkan perubahan nilai yang signifikan dalam tingkat kepuasan masyarakat. Setelah peningkatan dari 85 pada tahun 2021 menjadi 87,83 pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis ke 79,26 pada tahun 2023, yang mengindikasikan adanya masalah dalam pelayanan. Namun, pada tahun 2024, nilai IKM kembali meningkat tajam menjadi 91,12, menunjukkan adanya perbaikan signifikan. Nilai ini menekankan pentingnya peningkatan dan konsistensi dalam menjaga kualitas pelayanan untuk memastikan kepuasan masyarakat tetap terjaga dari tahun ke tahun.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91,12. Meskipun mengalami naik turun yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, nilai SKM Diskominfo Provinsi Jambi berhasil meningkat secara signifikan pada tahun 2024.
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu sarana dan prasarana, waktu penyelesaian pelayanan dan kompetensi pelaksana.
3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif, kemudian penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sistem mekanisme dan prosedur.
4. Peningkatan di bidang Sarana dan Prasarana perlu difokuskan pada kenyamanan dan kebersihan fasilitas, termasuk WC dan ruang tunggu. Sementara itu, perbaikan dalam Waktu Penyelesaian harus memastikan bahwa proses layanan berjalan lebih cepat dan efisien, terutama dalam aplikasi SiAbon. Selain itu, peningkatan Kompetensi Pelaksana melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai akan sangat penting untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dan responsif.

Jambi, 24 Oktober 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jambi

KEPALA DINAS,



Drs. ARIANSYAH, ME

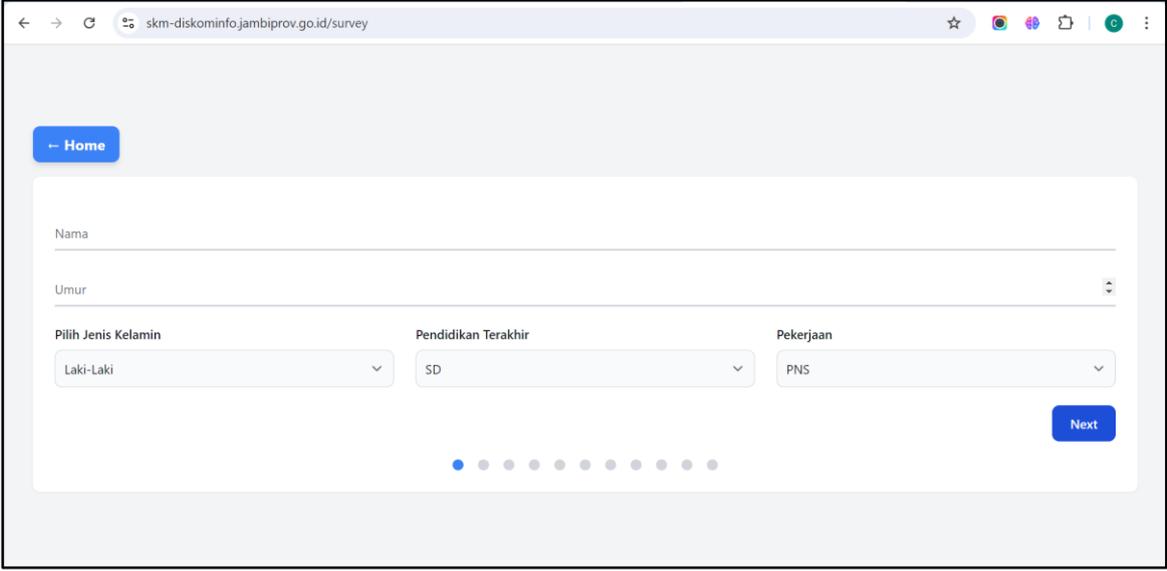
Drs. Pembina Utama Madya

NIP. 19720603 199302 1 001

LAMPIRAN

1. Kuesioner

Form biodata



The screenshot shows a web browser window with the URL `skm-diskominfo.jambiprov.go.id/survey`. The page features a navigation bar with a "Home" button. The main content area contains a form with the following fields:

- Text input: Nama
- Text input: Umur
- Dropdown menu: Pilih Jenis Kelamin (selected: Laki-Laki)
- Dropdown menu: Pendidikan Terakhir (selected: SD)
- Dropdown menu: Pekerjaan (selected: PNS)

A "Next" button is located at the bottom right of the form. A progress indicator at the bottom shows the first step is active.

Pertanyaan 1 (Persyaratan)



The screenshot shows a web browser window with the URL `skm-diskominfo.jambiprov.go.id/survey`. The page features a navigation bar with a "Home" button. The main content area contains a question:

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.

Below the question are four response options, each represented by a colored circle with an emoji:

- Blue circle with a wide smile: Sangat sesuai.
- Green circle with a slight smile: Sesuai.
- Yellow circle with a neutral expression: Kurang sesuai.
- Red circle with a sad expression: Tidak sesuai.

"Back" and "Next" buttons are located at the bottom left and right of the response area, respectively. A progress indicator at the bottom shows the first step is active.

Pertanyaan 2 (Sistem, Mekanisme, dan Prosedur)

← Home

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.

 Sangat mudah.	 Mudah.	 Kurang mudah.	 Tidak mudah.
--	---	---	---

Back Next

Progress indicator: 10 dots, 4th dot is active.

Pertanyaan 3 (Waktu Penyelesaian)

← Home

Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.

 Sangat cepat.	 Cepat.	 Kurang cepat.	 Tidak cepat.
--	---	---	---

Back Next

Progress indicator: 10 dots, 4th dot is active.

Pertanyaan 4 (Biaya/Tarif)

← Home

Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.

Gratis Murah Cukup mahal Sangat mahal

Back Next

Pertanyaan 5 (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan)

← Home

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

Sangat sesuai Sesuai. Kurang sesuai Tidak sesuai

Back Next

Pertanyaan 6 (Kompetensi Pelaksana)

— Home

Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.

 Sangat kompeten	 Kompeten	 Kurang kompeten	 Tidak kompeten
--	---	---	---

Back Next

Progress indicator: 10 dots, 6th dot is blue.

Pertanyaan 7 (Perilaku Pelaksana)

— Home

Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.

 Sangat sopan dan ramah	 Sopan dan ramah	 Kurang sopan dan ramah	 Tidak sopan dan ramah
---	--	--	--

Back Next

Progress indicator: 10 dots, 6th dot is blue.

Pertanyaan 8 (Sarana dan prasarana)

← Home

Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.

 Sangat Baik	 Baik	 Cukup.	 Buruk.
--	---	--	---

Back Next

Progress indicator: 10 dots, 8th dot is blue.

Pertanyaan 9 (Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan)

← Home

Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan.

 Dikelola dengan baik.	 Berfungsi kurang maksimal	 Ada tetapi tidak berfungsi	 Tidak ada.
--	--	--	---

Back Next

Progress indicator: 10 dots, 8th dot is blue.

Form Kritik dan Saran

Input Pertanyaan Survei

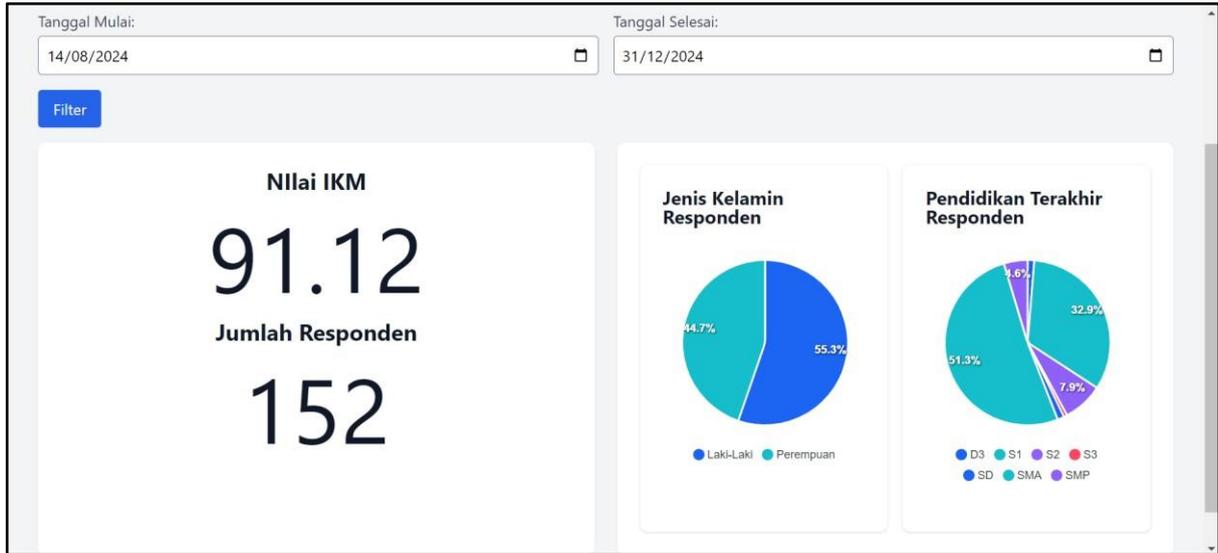
INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN 1	JAWABAN 2	JAWABAN 3	JAWABAN 4	ACTION
Persyaratan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	Tidak sesuai.	Kurang sesuai.	Sesuai.	Sangat sesuai.	...
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	Tidak mudah.	Kurang mudah.	Mudah.	Sangat mudah.	...
Waktu Penyelesaian	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	Tidak cepat.	Kurang cepat.	Cepat.	Sangat cepat.	...
Biaya/Tarif	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.	Sangat mahal.	Cukup mahal.	Murah.	Gratis.	...
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	Tidak sesuai.	Kurang sesuai.	Sesuai.	Sangat sesuai.	...
Kompetensi Pelaksana	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.	Tidak kompeten.	Kurang kompeten.	Kompeten.	Sangat kompeten.	...
Perilaku Pelaksana	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.	Tidak sopan dan ramah.	Kurang sopan dan ramah.	Sopan dan ramah.	Sangat sopan dan ramah.	...
Sarana dan prasarana	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.	Buruk.	Cukup.	Baik.	Sangat Baik.	...
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan.	Tidak ada.	Ada tetapi tidak berfungsi.	Berfungsi kurang maksimal.	Dikelola dengan baik.	...

2. Hasil Olah Data SKM

Form Publikasi IKM Diskominfo Provinsi Jambi



Dashboard Admin



3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)





DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

Laporan ini menyajikan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Jambi. SKM adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Sistem berbasis website ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan data, akurasi hasil, dan kemudahan dalam analisis serta pelaporan.

Hasil survei menunjukkan bahwa aspek Sarana dan Prasarana mendapatkan skor terendah dengan nilai 3,4, diikuti oleh Waktu Penyelesaian (3,49), dan Kompetensi Pelaksana (3,62). Sebaliknya, aspek Biaya/Tarif meraih skor tertinggi, diikuti oleh Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (3,77), serta Sistem Mekanisme dan Prosedur (3,68).

Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan layanan publik di masa mendatang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Jl. A Yani No.1, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361

Telepon: (0741) 6629

Email: info@diskominfo.jambi.go.id

Website: www.diskominfo.jambi.go.id

Hak Cipta © 2024 Diskominfo Provinsi Jambi. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.